

INDIKATOR PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 2012

ISBN : -
No.Publikasi : 9400.1316
Katalog BPS : 4302002.94
Ukuran Buku : 16 X 21,5
Jumlah Halaman : viii + 77

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://papua.bps.go.id>

KATA PENGANTAR


Publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini merupakan publikasi yang ke-enam dan diharapkan akan menjadi publikasi yang rutin diterbitkan. Publikasi ini adalah hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Papua melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data sekunder dari instansi terkait lainnya.

Menyadari adanya berbagai keterbatasan yang ada, BPS Provinsi Papua terus berusaha menyediakan data, menerbitkan publikasi serta memberikan ulasan berbagai data hasil survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipergunakan bagi para pengguna.

Selanjutnya Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini, diharapkan dapat dipergunakan untuk penyusunan perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah di bidang pendidikan yang lebih mengantarkan kepada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini dihaturkan terima kasih.

Jayapura, September 2013
Kepala BPS Provinsi Papua



Ir. Didik Koesbianto, M.Si
NIP. 19650809 198702 1 001

ORGANISASI PENULISAN

Koordinator

Ir. Didik Koesbianto, M.Si

Editor

Suntono, SE

Penulis dan Pengolah Data

Sugiyanto, M.Si

Mety Irjayanti, SST

Layout

Mety Irjayanti, S.ST

Desain Cover

M. Tobroni, S.ST

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
ORGANISASI PENULISAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	
2.1. Sumber Data	6
2.2. Metode Pengumpulan Data	6
2.3. Cakupan Sampel	6
2.4. Metode Analisis	7
2.5. Konsep Definisi	8
BAB III KEADAAN PENDIDIKAN DI PAPUA	
3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18
3.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	22
3.3. Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Life Skill</i>)	27
3.4. Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	28

3.5.	Pendidikan Berkeadilan Gender	36
3.6.	Peningkatan Mutu Pendidikan	37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	43
4.2.	Saran	44

TABEL-TABEL LAMPIRAN	45
-----------------------------	-----------

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 3.1	Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, Guru TK, 2007-2011	21
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2012	26
Tabel 3.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Papua , 2012	35
Tabel 3.4.	Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru Provinsi Papua, Tahun 2010-2011	38
Tabel 3.5.	Rasio Sekolah-Murid, Guru-Murid dan Rasio Sekolah-Guru Pada Jenjang SD, SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Tahun 2010-2011	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1	Perkembangan PAUD (3-6 Tahun) Provinsi Papua, 2008-2012	19
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Umur 3 – 6 Tahun Menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Papua, Tahun 2012	19
Gambar 3.3	Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Terlayani PAUD Dirinci Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2012	20
Gambar 3.4	Jumlah Lembaga PAUD, 2010/2011	20
Gambar 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2012	22
Gambar 3.6	Perkembangan APS Provinsi Papua Tahun 2009 - 2012	23
Gambar 3.7	APS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2012	23
Gambar 3.8	APK Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2012	24
Gambar 3.9	Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Muda Menurut Status Daerah, Provinsi Papua Tahun 2012	28
Gambar 3.10	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Muda Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Papua Tahun 2012	29
Gambar 3.11	Sebaran Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Muda , Provinsi Papua Tahun 2012	30
Gambar 3.12	Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Dewasa Menurut Status Daerah, Provinsi Papua Tahun 2012	31
Gambar 3.13	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Dewasa Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Papua Tahun 2012	32
Gambar 3.14	Sebaran Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Dewasa, Provinsi Papua Tahun 2012	33

Gambar 3.15	Sebaran Penduduk Usia 10 Tahun Lebih yang Berijazah SMP Ke Atas, Tahun 2012	36
Gambar 3.16	Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Provinsi Papua, 2008-2011	40
Gambar 3.17	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Bukan Makanan di Provinsi Papua Tahun 2012	41

<http://papua.bps.go.id>

<http://papua.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan skaligus investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan suatu bangsa.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Pemenuhan hak asasi pendidikan tersebut, pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

Untuk melihat perkembangan dan situasi pendidikan di Papua, diperlukan indikator-indikator pendidikan yang akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai. Oleh karena itu, publikasi ini disusun untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang capaian pembangunan pendidikan Provinsi Papua sampai dengan tahun 2011. Analisis diskriptif diperlukan untuk membuat indikator tersebut menjadi lebih menarik dan mudah dibaca oleh banyak orang dan pada akhirnya dipahami khususnya oleh para pengambil keputusan dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

1.2 Tujuan

Secara umum penulisan publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini untuk memberikan gambaran keadaan serta kondisi pendidikan yang telah dan sedang dicapai oleh masyarakat di Provinsi Papua secara keseluruhan. Untuk selanjutnya agar lebih dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh para pemakai data dan akhirnya ditindaklanjuti oleh yang berwenang dengan didasarkan data yang ada dalam rangka menyongsong program pemerintah di bidang pendidikan menuju *Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS)* dan *Program Wajib Belajar (Wajar)*.

1.3 Ruang Lingkup

Indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pendidikan umum maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka indifikasi indikator ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan prasekolah (TK) penduduk usia 3 – 6 tahun dan pendidikan sekolah dasar umur 7 – 12 tahun.
2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama usia 13 – 15 tahun baik umum maupun kejuruan dan menengah lanjutan 16 –18 tahun baik umum maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi dengan usia 19 – 24 tahun.

Data indikator pendidikan yang disajikan pada publikasi ini bersifat umum, sesuai dengan yang tercakup pada tabel hasil pengolahan yang bersumber dari Susenas, terutama data KOR. Data yang disajikan meliputi partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan serta fasilitas sekolah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jenis data dan ruang lingkup data pendidikan yang tersedia, maka analisis sederhana dikelompokkan menurut urutan proses dan dampak program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Bab I menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya analisis ini dan tujuan yang diharapkan. Sedangkan Bab II memberikan penjelasan tentang metodologi dari pengumpulan data serta konsep yang dipergunakan. Setelah secara umum diketahui maksud dan tujuan publikasi ini, maka besaran angkanya dianalisis secara sederhana dan tertuang di dalam Bab III. Bab ini membahas tentang situasi pendidikan masyarakat di Provinsi Papua yang berkaitan dengan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Akhirnya Bab IV menyajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diharapkan.

METODOLOGI

2

<http://papua.bps.go.id>

2.1 Sumber Data

Sumber data utama dari penulisan Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini, adalah hasil pengolahan data KOR Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012. Dari beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan wahana yang memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan. Pertama, bila dibandingkan dengan kegiatan lain, Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas dimana salah satu diantaranya adalah data pendidikan. Kedua, Susenas dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan data yang paling mendesak. Hal ini dimungkinkan karena mulai tahun 2011 pelaksanaan Susenas dilakukan secara triwulanan, sehingga kondisi sosial ekonomi penduduk Papua dapat diketahui fluktuasinya setiap triwulan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditunjukkan kepada individu, maka yang menjadi responden untuk mendapatkan keterangan ini adalah individu yang bersangkutan.

Berbeda dengan keterangan individu, maka data tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

2.3 Cakupan Sampel

Sebaran sampel Susenas 2012 yang sebagian besar di wilayah sulit dan susah dijangkau menjadikan tidak semua sampel BS dapat dikunjungi. Dari target 1.228 sampel BS, dalam pelaksanaannya petugas lapangan hanya mampu mengunjungi sebanyak 1.131

(92,10 persen). Namun dalam kompilasi data di BPS RI tidak semuanya masuk sebagai raw data final. Terdapat data-data rumah tangga yang tidak diikutsertakan dalam penghitungan karena dianggap outlier maupun karena data sudah melampaui batas waktu pengolahan. Sehingga raw data final Susenas 2012 berjumlah 973 BS (*response rate* BS = 79,2 persen). BS yang tidak dapat dikunjungi sebagian besar berada di wilayah pegunungan, untuk menjangkaunya hanya dengan transportasi udara ataupun berjalan kaki.

Dari BS yang berhasil dikunjungi petugas, dalam pelaksanaannya tidak semua rumah tangga sampel dapat diwawancarai. Alasan responden tidak dapat diwawancarai diantaranya karena responden menolak untuk diwawancarai ataupun tidak berhasil ditemui sampai dengan berakhirnya waktu pencacahan. Sehingga jumlah sampel rumah tangga setiap BS tidak selalu lengkap (10 responden). Karena alasan tersebut, *rasponse rate* sampel rumah tangga hanya sebesar 76,0 persen dan lebih kecil dari *response rate* BS. *Rasponse rate* sampel rumah tangga tersebut berbeda-beda antar_kabupaten/kota dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Kabupaten dengan *response rate* baik (lebih dari 90 persen) sebanyak 8 kabupaten/kota.
- b. Kabupaten dengan *response rate* cukup (75 persen s/d 89 persen) sebanyak 9 kabupaten.
- c. Kabupaten dengan *response rate* rendah (kurang dari 75 persen) ada sebanyak 13 kabupaten.

Tabel 2.1

Persentase *Response rate* BS dan Rumah Tangga Susenas 2012 Dirinci Per Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	Target BS	BS Berhasil di Data		Raw Data Final		Target Ruta	Ruta data Final	%
		Jml	%	Jml	%			
[01] Merauke	52	52	100,0	49	94,2	520	451	86,7
[02] Jayawijaya	52	52	100,0	27	51,9	520	255	49,0
[03] Jayapura	44	42	95,5	43	97,7	440	396	90,0
[04] Nabire	48	48	100,0	48	100,0	480	469	97,7
[08] Kep. Yapen	44	44	100,0	37	84,1	440	355	80,7
[09] Biak Numfor	48	48	102,1	48	100,0	480	457	95,2
[10] Paniai	48	48	100,0	37	77,1	480	361	75,2
[11] Puncak Jaya	44	27	61,4	24	54,5	440	236	53,6
[12] Mimika	52	52	100,0	51	98,1	520	478	91,9
[13] Boven Digoel	40	34	85,0	35	87,5	400	299	74,8
[14] Mappi	44	44	100,0	35	79,5	440	340	77,3
[15] Asmat	44	42	95,5	36	81,8	440	360	81,8
[16] Yahukimo	52	41	78,8	30	57,7	520	294	56,5
[17] Peg. Bintang	44	22	50,0	12	27,3	440	115	26,1
[18] Tolikara	48	37	77,1	34	70,8	480	340	70,8
[19] Sarmi	28	28	100,0	28	100,0	280	267	95,4
[20] Keerom	40	40	102,5	35	87,5	400	336	84,0
[26] Waropen	24	24	100,0	18	75,0	240	160	66,7
[27] Supiori	24	22	91,7	18	75,0	240	170	70,8
[28] Mamberamo Raya	24	23	95,8	17	70,8	240	170	70,8
[29] Nduga	44	44	100,0	43	97,7	440	429	97,5
[30] Lanny Jaya	52	50	96,2	38	73,1	520	372	71,5
[31] Mamb. Tengah	32	31	96,9	31	96,9	320	305	95,3
[32] Yalimo	40	41	102,5	35	87,5	400	340	85,0
[33] Puncak	44	23	52,3	17	38,6	440	167	38,0
[34] Dogiyai	44	41	93,2	41	93,2	440	404	91,8
[35] Intan Jaya	32	32	103,1	27	84,4	320	270	84,4
[36] Deiyai	40	40	100,0	35	87,5	400	350	87,5
[71] Jayapura	56	56	100,0	44	78,6	560	381	68,0
JUMLAH	1.228	1.131	92,1	973	79,23	12.280	9.327	76,0

Besar kecilnya *response rate* sampel rumah tangga terkait dengan estimasi statistik yang dihasilkan. Syarat paling utama untuk mendapatkan statistik yang valid adalah ketepatannya dalam menggambarkan atau mewakili (merepresentasikan) informasinya. Artinya untuk menghasilkan statistik yang baik dibutuhkan kecukupan sampel yang dapat mewakili populasinya. Jika jumlah sampel yang dikumpulkan tidak mencukupi (sedikit) maka estimasi statistik yang dihasilkan akan bias dan menjauhi nilai parameternya. Terkait hal tersebut, dalam membaca statistik (indikator) yang dihasilkan dalam Susenas 2012 khususnya estimasi level kabupaten/kota, perlu kehati-hatian dalam menganalisisnya, terutama untuk kabupaten yang response ratenya rendah. *Response rate* BS dan rumah tangga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Selain itu, keakuratan setiap indikator bergantung pada kecukupan sampel yang dapat mewakili populasinya. Kebutuhan sampel untuk estimasi setiap indikator berbeda-beda. Indikator yang peluang terjadinya jarang (*real cases*) membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar. Prof. Manar Abdel Rahman seorang *expert* yang sering terlibat dalam survei berbasis rumah tangga seperti *Demographic and Health Surveys* (DHS) dan *Multiple Indicator Cluster Surveys* (MICS) mengatakan bahwa untuk menghasilkan indikator dalam bentuk proporsi atau persentase yang baik dihasilkan dari sejumlah sampel dengan denominator (tanpa pembobot) sebesar 50. Jika denominator indikator tersebut antara 25 – 50 maka indikator tersebut masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian dalam membacanya. Sedangkan jika denominatornya kurang dari 25 maka indikator lebih baik tidak digunakan. Oleh karena Susenas 2012 juga merupakan survei yang berbasis rumah tangga maka dalam penyajian data sebaiknya mengacu pada kaidah tersebut.

2.4 Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini meliputi data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum tentang keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2011. Analisis bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.5 Konsep Definisi

Dalam berbagai pembahasan, seringkali kita memandang sesuatu dengan cara yang berbeda, untuk itu di dalam publikasi ini guna menghindari persepsi dan anggapan yang berbeda telah disepakati konsep dan definisi yang digunakan. Konsep dan definisi yang digunakan meliputi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf. Seseorang dikatakan **bersekolah** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.

2.5.1 Partisipasi sekolah

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal;

Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan **masih** bersekolah.

2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan **masih** bersekolah.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

Catatan:

1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

2.4.2 Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
 - a. *Program gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi,

mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).

- b. *Program non-gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

2.4.3 Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ sederajat/kejuruan adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama};

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

Program D.I/II adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

Contoh:

- a. Akademi Seni Musik Indonesia
- b. Akademi Seni Tari Indonesia
- c. Akademi Bahasa Asing
- d. Akademi Pimpinan Perusahaan
- e. Akademi Kimia Analisis
- f. Akademi Meteorologi dan Geofisika

Program D.IV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Catatan:

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.

2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

2.4.4 Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki

Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

Madrasah Ibtidaiyah (Mi) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

SMA/ sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

2.4.5 Dapat membaca dan menulis

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat “*Anda harus berlaku adil*”;

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.

<http://papua.bps.go.id>

KEADAAN PENDIDIKAN
DI PAPUA

<http://papua.bps.go.id>

3

Sumber daya manusia berperan penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, baik formal maupun non formal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup (*life skill*) kepada masyarakat. Pendidikan non formal juga dapat membekali sikap kemandirian yang mendorong tercapainya kesempatan untuk berwirausaha, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek.

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya pada tahun 1994 pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia juga mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA), sebagai upaya lain dalam meningkatkan pendidikan.

Dalam program PUS ini, pelayanan pendidikan harus dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Dimana terdapat 6 (enam) target PUS yang akan dicapai hingga tahun 2015 yang meliputi pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keaksaraan dan berkelanjutan, pendidikan berkeadilan gender dan peningkatan mutu pendidikan.

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting diberikan mengingat dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penentu kehidupan pada masa mendatang. Di tangan merekalah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara berada. Pembentukan karakter bangsa dan kehandalan sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana memberikan perlakuan yang tepat kepada mereka sedini mungkin.

Pentingnya PAUD juga didukung oleh penelitian-penelitian tentang kecerdasan otak. Seorang bayi yang baru lahir memiliki kurang lebih 100 miliar sel otak. Sel-sel syaraf ini harus rutin distimulasi dan didayagunakan agar terus berkembang jumlahnya. Jika tidak, jumlah sel tersebut akan semakin berkurang yang berdampak pada pengikisan segenap potensi kecerdasan anak.

Usia dari kelahiran hingga enam tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan semua anak, karena pada usia inilah perkembangan sel-sel otak sangat cepat. Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan anak serta sikap dan perilaku sepanjang rentang kehidupannya. Pada usia rawan saat anak mulai banyak bergerak, yaitu usia 6 bulan, angka kecelakaan dapat berkurang sebanyak 80 persen bila mereka diberi rangsangan dini. Pada umur 3 tahun, anak-anak ini akan mempunyai IQ 10 sampai 20 poin lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan stimulasi. Pada usia 12 tahun, mereka tetap memperoleh prestasi yang baik dan pada usia 15 tahun, tingkat intelektual mereka semakin bertambah. Ini memberi gambaran bahwa pendidikan sejak dini memberikan efek jangka panjang yang sangat baik. Sebaliknya, bila anak mengalami stress pada usia-usia awal pertumbuhannya akan berpengaruh juga pada perkembangan otaknya. Pengalaman yang tidak menyenangkan akan membekas lama dan cukup memberi efek mengubah komposisi sel di dalam otak. Anak yang dibesarkan di dalam lingkungan yang minim stimulasi, berkurang kecerdasannya selama 18 bulan yang tidak mungkin tergantikan. Anak yang masuk PAUD pada usia tiga tahun mungkin saja menunjukkan kemampuan, tetapi tetap

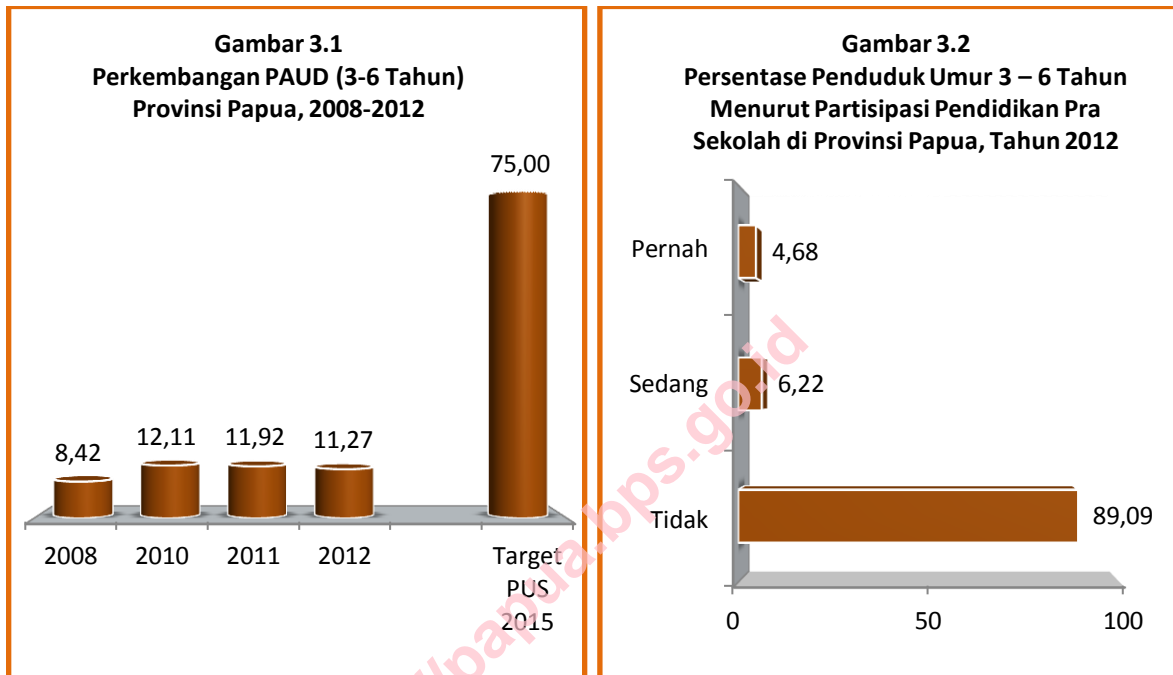
mereka kelak tidak dapat menunjukkan kecerdasan yang prima bila mereka kehilangan tiga tahun pertama masa pertumbuhannya.

Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, secara khusus pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP No. 39/1992 mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Untuk menegaskan komitmen pemerintah, Pada tanggal 23 Juli 2003 Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mencanangkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Pencanaan tersebut bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003.

Pendidikan anak usia dini bertujuan agar semua anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal guna melejitkan kecerdasan yang dimilikinya. PAUD juga merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara lebih spesifik program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui : (1) PAUD non formal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Melalui PAUD diberikan pendidikan, perawatan dan pengembangan anak secara terpadu, sehingga diharapkan masa keemasan (*the golden age*) tersebut dapat secara optimal dikembangkan.

Perkembangan partisipasi PAUD di Provinsi Papua selama periode 2008-2012 mengalami trend yang menurun. Artinya persentase anak usia dini yang terlayani PAUD dari tahun ke tahun terus berkurang. Padahal pada periode 2008-2010 perkembangan partisipasi PAUD mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2008 terdapat 8,42 persen anak usia dini yang terlayani PAUD, dua tahun berikutnya (tahun 2010) meningkat menjadi 12,11 persen. Pertumbuhan penduduk Papua yang relatif tinggi (4,52 persen) khususnya pada kelompok anak usia dini tidak dibarengi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas pendukung PAUD. Alhasil pada tahun 2011 hingga 2012

partisipasi PAUD Provinsi Papua mengalami penurunan menjadi 11,27 persen (lihat Gambar 3.1).

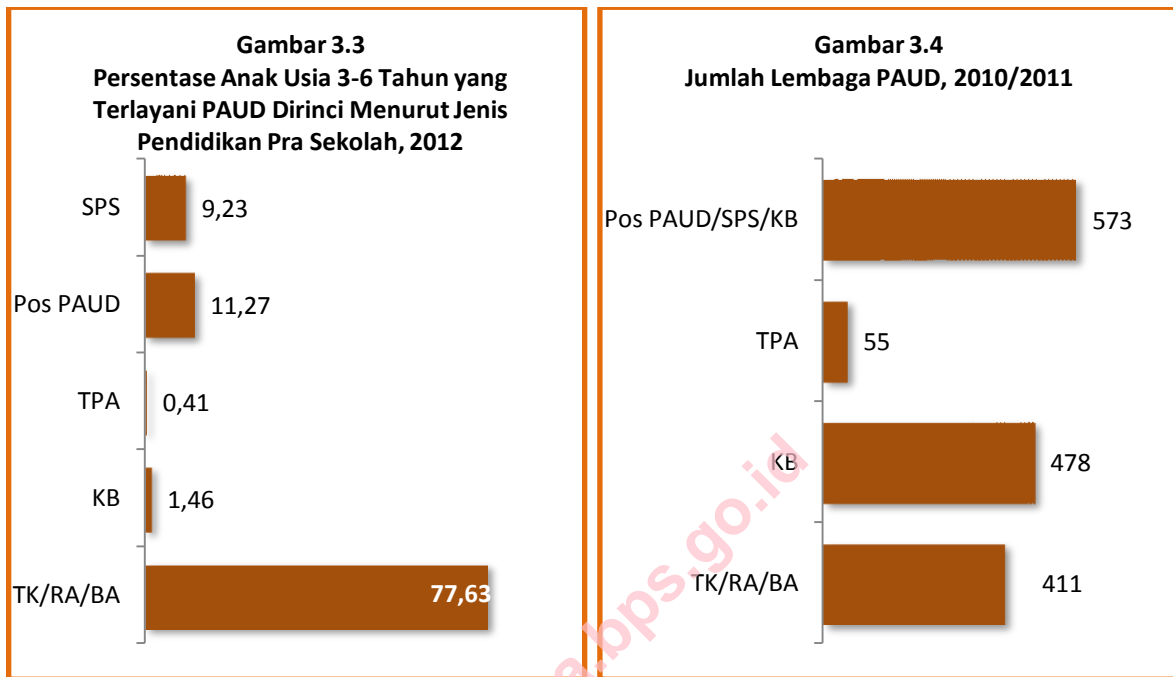


Sumber : Susenas 2012

Sumber : Susenas 2012

Dari 11,27 persen anak usia dini yang terlayani PAUD terdiri dari 69,12 persen anak yang sedang mengikuti program PAUD dan 30,88 persen yang pernah mengikuti (alumni) PAUD dan sekarang mereka sedang bersekolah di pendidikan dasar. Ditinjau menurut jenis kelamin, tidak terdapat kesenjangan akses partisipasi PAUD antara laki-laki dan perempuan. Tercatat pada tahun 2012 persentase partisipasi PAUD anak laki-laki sebesar 11,08 persen dan perempuan sebesar 11,45 persen. Untuk dapat lebih jelasnya lihat di tabel lampiran.

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pendidikan pra sekolah yang paling banyak menampung pendidikan PAUD yaitu mencapai 77,63 persen. Disusul dengan lembaga pendidikan Pos PAUD, Satuan Paud Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Pengajian Anak (TPA).



Sumber : Susenas 2012

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Prov. Papua

Walaupun selama empat tahun terakhir jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan sarana PAUD lainnya bertambah, namun sebarannya tidak merata. Fasilitas PAUD sebagian besar berada di daerah perkotaan, padahal hampir tiga per empat (74,04 persen) penduduk Papua tinggal di daerah perdesaan. Akibatnya banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan tidak dapat terlayani PAUD. Selain itu jumlah guru TK pun terbatas, penambahan jumlah guru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah murid. Idealnya satu guru TK mendidik 15 sampai 20 murid sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat lebih maksimal. Akan tetapi pada kenyataannya dengan melihat Rasio Murid terhadap Guru, rata-rata satu guru TK harus mendidik 23 hingga 34 murid.

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru TK, 2007-2011

Tahun	Jumlah TK	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	2	3	4	5
2007/2008	350	20.467	788	25,97
2008/2009	364	22.021	639	34,46
2009/2010	392	24.218	748	32,38
2010/2011	411	26.096	1.115	23,40

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua (diolah)

Dibanding target yang ditetapkan dalam Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) yaitu 75 persen pada tahun 2015, maka capaian partisipasi PAUD Papua masih jauh dari harapan. Demikian juga jika dibanding dengan partisipasi PAUD nasional, akses PAUD bagi anak usia dini di Provinsi Papua jauh di bawah angka PAUD nasional. Rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti pendidikan anak usia dini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua. Berdasarkan capaian IPM pada tahun 2011, Papua menempati peringkat terbawah, yaitu 33 dari 33 Provinsi se-Indonesia.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD di Provinsi Papua ke depan dengan membangun fasilitas pendidikan TK/RA/BA, Pos PAUD, atau lainnya terutama di perdesaan. Sehingga diharapkan masa keemasan anak (*the golden age*) dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan menjadi kader-kader penerus pembangunan di Provinsi Papua yang berkualitas dimasa mendatang.

3.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan kemampuan belajar minimal (*minimum learning capacity*) melalui pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal, yaitu : SD, SMP dan SMA serta Kejar Paket A, B, dan C . Sehingga diharapkan seluruh anak usia 7-

15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.

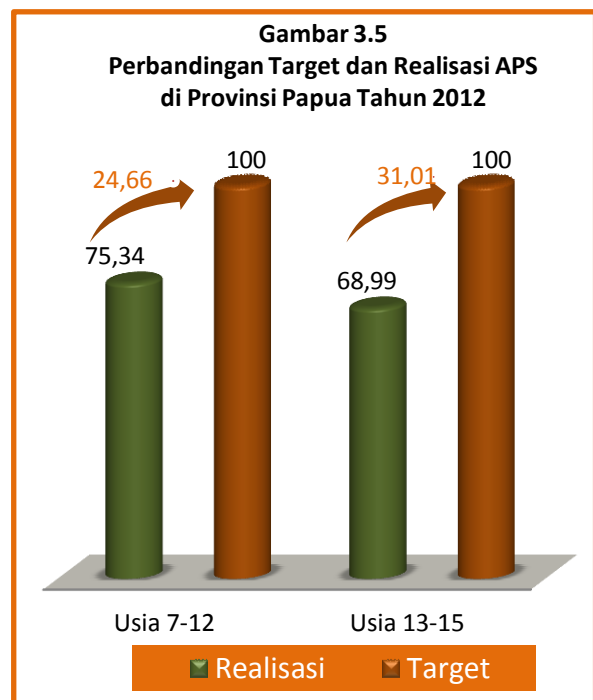
Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar dasar 9 tahun adalah indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan rata-rata lama sekolah.

3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD (umur 7-12) dan APS SMP (umur 13-15 tahun) sebesar 100 persen.

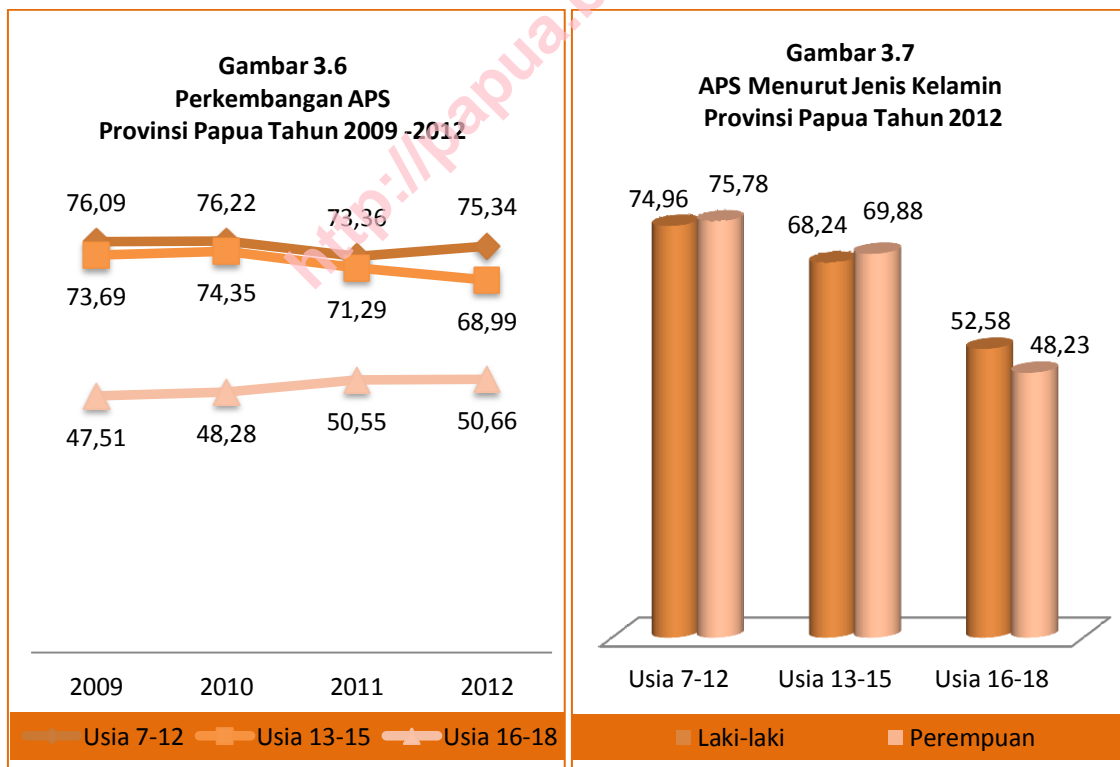
Berdasarkan data Susenas Tahun 2012, APS penduduk 7–12 tahun mencapai 75,34 persen, ini berarti masih terdapat



Sumber : Susenas 2012

24,66 persen penduduk 7-12 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi. Dari 75,34 persen penduduk umur 7-12 tahun yang bersekolah ada yang masih sekolah di SD, ada pula yang sudah duduk di bangku SMP. Sedangkan APS penduduk umur 13-15 tahun sebesar 68,99 persen artinya 31,01 persennya masih belum sekolah atau tidak sekolah lagi dan 68,99 persen penduduk berumur 13-15 tahun masih aktif bersekolah pada tingkat SD, SLTP atau sudah di bangku SLTA.

Dari uraian di atas terlihat bahwa capaian APS untuk usia 7-12 tahun (75,34 persen) belum memenuhi target wajib belajar yang ditetapkan (APS 100 persen), demikian juga target APS usia 13-15 tahun belum terlampaui. Sehingga dikatakan penerapan program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum sepenuhnya berhasil, baik pada jenjang pendidikan SD/ sederajat ataupun SMP/ sederajat.



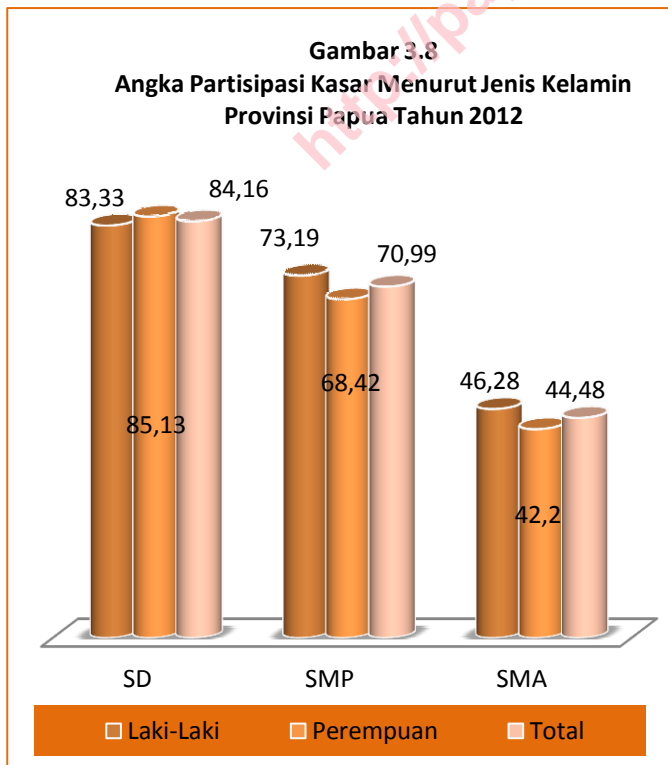
Sumber : Susenas 2012

Sumber : Susenas 2012

Sementara dari sisi perkembangan dalam kurun waktu tiga tahun (2009-2012), APS Provinsi Papua secara umum mengalami trend yang positif. Meskipun perkembangannya lambat tetapi partisipasi anak sekolah pada kelompok umur 7-12 dan 16-18 mengalami kenaikan. Berbeda halnya dengan APS pada kelompok umur 7-12, APS pada kelompok umur 13-15 nilainya bergerak menurun.

Dari sisi gender nampak bahwa pada usia 7-15 tahun hampir tidak terdapat perbedaan partisipasi sekolah laki-laki dengan perempuan. Kesenjangan terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun. Pada kelompok usia tersebut perempuan Papua banyak yang putus sekolah dengan berbagai alasan diantaranya menikah, mencari nafkah ataupun alasan lainnya. Hasil Susenas tahun 2012 mengindikasikan bahwa APS laki-laki lebih tinggi dari APS perempuan terutama pada kelompok usia 16-18 tahun (lihat Gambar 3.5).

3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)



Sumber : Susenas 2012

Angka partisipasi kasar (APK), indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara sederhana, APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang menerima pendidikan dasar, menengah dan keatas. APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah

di masing-masing jenjang pendidikan. Berdasarkan data Susenas tahun 2012, nilai APK pada jenjang sekolah dasar sebesar 84,16 persen. Hal ini menunjukkan jumlah murid yang sedang bersekolah di jenjang SD/ sederajat lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk berumur 7-12 tahun.

<http://papua.bps.go.id>

Sama halnya dengan APK SD, APK untuk jenjang sekolah SMP dan SMA nilainya di bawah seratus. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 13-15 dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan mereka tidak sekolah lagi.

Sementara dari sisi gender nampak bahwa nilai APK SD hampir tidak terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Pada jenjang pendidikan tersebut perempuan di wilayah Papua lebih banyak yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/ di atasnya atau bahkan mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM.

3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APKnya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

APK pada jenjang SD/ sederajat pada tahun 2012 sebesar 84,16 persen sedang APM SD/ sederajat hanya sebesar 70,79 persen berarti bahwa murid SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun sebanyak 70,79 persen sedang selisih antara APK dan APM sebesar 13,37 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/ sederajat 13,37 persennya berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Sementara, pada jenjang SMP/ sederajat, APK nya sebesar 70,99 persen sedang APM nya sebesar 43,38 persen yang berarti bahwa hanya 43,38 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai murid SMP/ sederajat dan sisanya terserap dijenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak sekolah lagi. Selisih antara APK dan APM SMP/ sederajat sebesar 27,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di antara murid SMP/ sederajat 27,61 persennya berumur kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15

tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU/ sederajat, nilai APKnya juga lebih besar daripada APMnya.

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Papua Tahun 2012

No	Kota / Desa	Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM)		
			SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perkotaan	Lk	83,00	65,01	59,76
		Pr	85,83	58,53	57,422
		Total	84,32	61,81	58,75
2	Pedesaan	Lk	66,39	38,58	22,04
		Pr	67,76	38,35	16,57
		Total	67,02	38,48	19,61
3	Perkotaan + Pedesaan	Lk	69,97	43,78	32,25
		Pr	71,74	42,91	27,29
		PAPUA	Total	70,79	43,38

Sumber : Susenas 2012

Ditinjau dari sudut gender, terdapat perbedaan APM antara laki-laki dan perempuan. Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMU/ sederajat APM laki-laki lebih besar dari pada APM perempuan. Artinya pada jenjang ini perempuan cenderung memiliki kesempatan sekolah yang lebih kecil dibanding laki-laki. Lain halnya dengan jenjang pendidikan SD, nilai APM perempuan (71,74 persen) lebih besar dari pada nilai APM laki-laki (69,97 persen) yang berarti pada jenjang ini perempuan cenderung memiliki kesempatan sekolah yang lebih besar dibanding laki-laki.

Ditinjau dari tipe daerahnya, nampak APM penduduk di perkotaan lebih besar dibanding di pedesaan untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini berarti akses pendidikan masih belum banyak dirasakan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan.

3.3 Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Istilah Kecakapan Hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003). Penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih berorientasi kognitif (akademik) dan telah melahirkan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki pengetahuan tetapi kurang atau tidak memiliki keterampilan *vokasional* yang justru lebih diperlukan, baik untuk bekerja maupun berusaha mandiri.

Dengan adanya Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diharapkan mampu memberikan pendidikan yang lebih memberikan keterampilan (*vocational skill*) kepada penduduk usia 15 tahun ke atas, khususnya siswa putus sekolah atau yang tidak melanjutkan. Lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja dan penduduk usia produktif baik laki-laki maupun perempuan yang masih belum memiliki pekerjaan. Dengan demikian program PKH ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu strategi bagi pemerintah Provinsi Papua untuk mengurangi kemiskinan dan penanggulangan pengangguran.

3.4 Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan dalam rangka memberantas penduduk buta aksara supaya menjadi melek aksara (huruf). Seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut mampu membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pendidikan keaksaraan ini diperuntukkan bagi orang dewasa (*adult education*) untuk penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indikator-indikator yang biasa dijadikan ukuran keberhasilan program pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan yang ditamatkan penduduk.

3.4.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun)

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

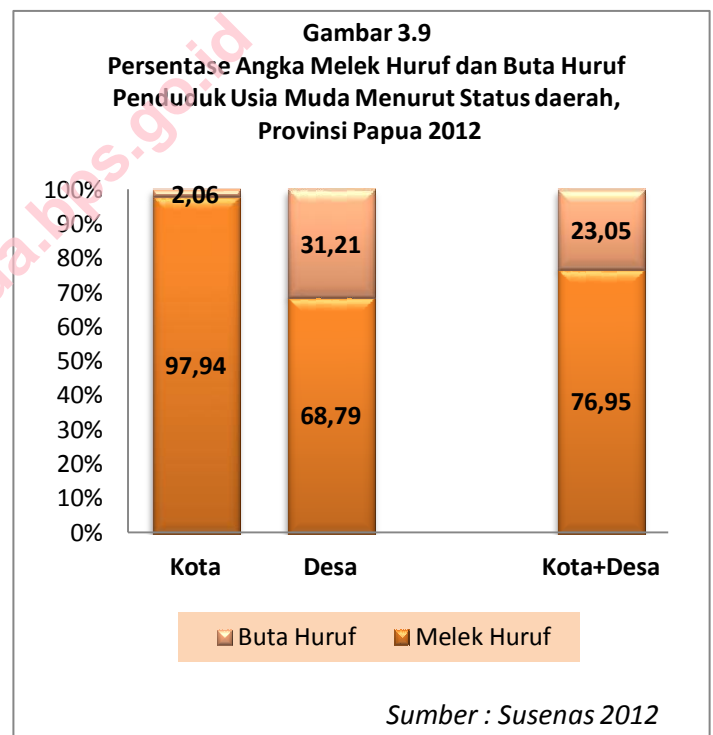
Penduduk usia muda merupakan salah satu kelompok penduduk yang produktif. Penduduk yang tergolong pada usia ini yakni umur 15-24 tahun. Umur penduduk Pada masa ini lah seharusnya kemampuan dasar dalam membaca dan menulis sudah dimiliki untuk menunjang masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012, sekitar 76,95 persen penduduk Usia muda di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan kata lain

terdapat 23,05 persen penduduk usia muda yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Ditinjau dari status daerah, persentase penduduk usia muda yang telah bebas buta huruf di perkotaan

sebesar 97,94 persen, sedangkan yang tinggal di perdesaan hanya sebesar 68,79 persen. Artinya penduduk usia muda yang telah bebas buta huruf lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan. Dengan kata lain sekitar 31,21 persen penduduk usia muda di perdesaan masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf.

Tingkat buta huruf pada usia ini cukup tinggi diduga karena tinggal sisa kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan



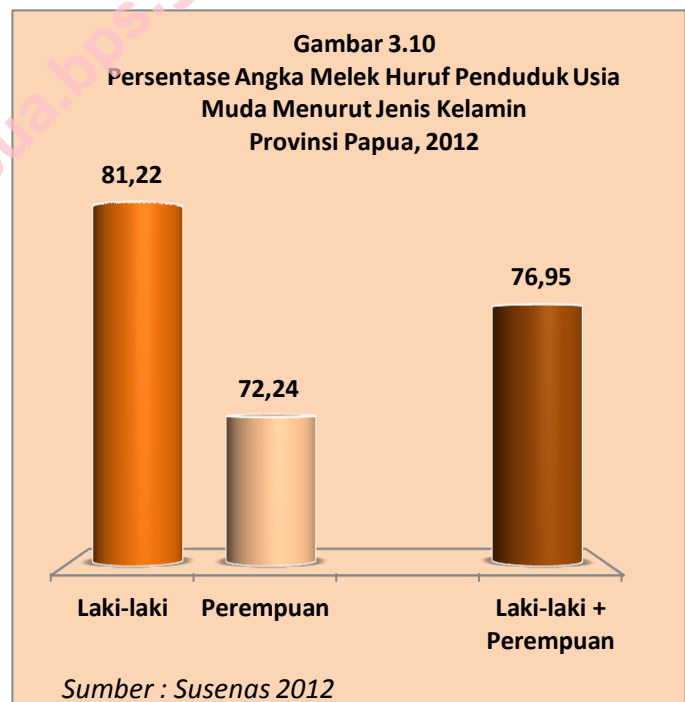
keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh factor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan factor eksternal seperti inefisiensi pada pendidikan persekolahan dan luar sekolah serta ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka. Selain itu, ketidaktersediaan fasilitas pendidikan di wilayah perdesaan juga menjadi kendala dalam pemberantasan buta aksara di Papua.

Berdasarkan data Potensi Desa 2011 menyebutkan dari 3.924 kampung yang ada, 58,2 persen tidak memiliki fasilitas sekolah dasar dan 89,6 persen tidak memiliki fasilitas SMP. Bahkan di Kabupaten Puncak Jaya 92,7 persen kampungnya tidak tersedia gedung SD. Dengan kata lain dari 302 kampung, gedung sekolah SD hanya terdapat di 22 kampung (7,3 persen). Oleh karena itu perlunya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan sehingga kedepan penduduk Papua tidak tertinggal dalam mencapai pendidikan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 3.1 memperlihatkan adanya kesenjangan angka melek huruf pada penduduk usia muda antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua. Persentase angka melek huruf laki-laki usia muda lebih tinggi dari perempuan usia muda.

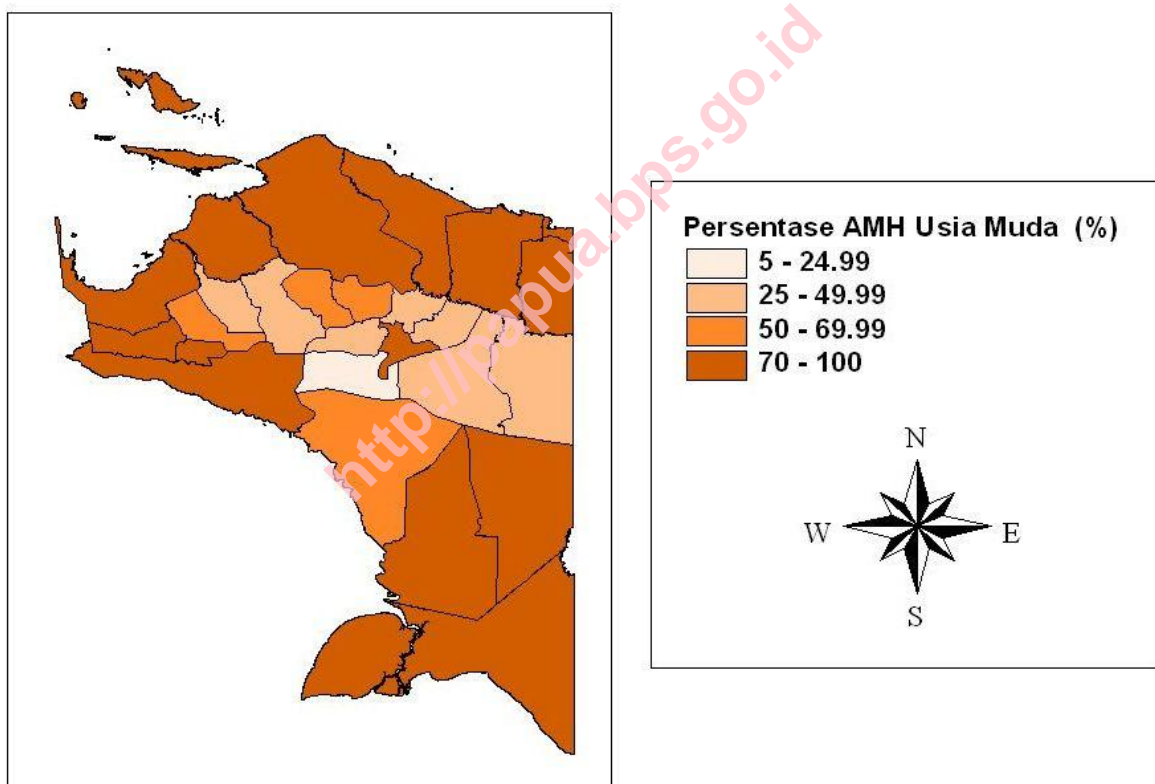
Selain itu, angka melek huruf laki-laki usia muda juga berada di atas angka melek huruf penduduk usia muda di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan laki-laki untuk menikmati dunia pendidikan lebih besar dibandingkan perempuan baik pendidikan formal maupun non formal.

Hasil Susenas 2012 juga mengindikasikan adanya disparitas angka melek huruf antar-kabupaten/kota. Kota Jayapura merupakan daerah yang penduduk usia



mudanya bisa membaca dan menulis huruf latin terbanyak atau angka melek hurufnya tertinggi yaitu sebesar 99,50 persen atau hampir semua penduduk usia mudanya bisa membaca dan menulis huruf latin. Secara berurutan selain Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika merupakan kabupaten/kota yang angka melek hurufnya tinggi atau di atas 90 persen. Dengan kata lain, hampir semua penduduk usia muda yang berada di wilayah pesisir mudah dapat membaca dan menulis huruf latin.

Gambar 3.11
Persentase Angka Melek Huruf Usia Muda Provinsi Papua, 2012



Sumber : Susenas 2012 dan SP 2010

Sementara kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan sulit, pada umumnya angka melek huruf penduduk usia mudanya berada di bawah 50 persen, kecuali Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya yang persentase angka melek hurufnya di atas 50 persen. Artinya masih banyak sekali penduduk usia muda yang tinggal di wilayah ini belum bisa membaca dan menulis huruf latin. Bahkan kabupaten yang

memiliki persentase angka melek huruf terkecil juga berada di wilayah ini yakni Kabupaten Nduga (17,79 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

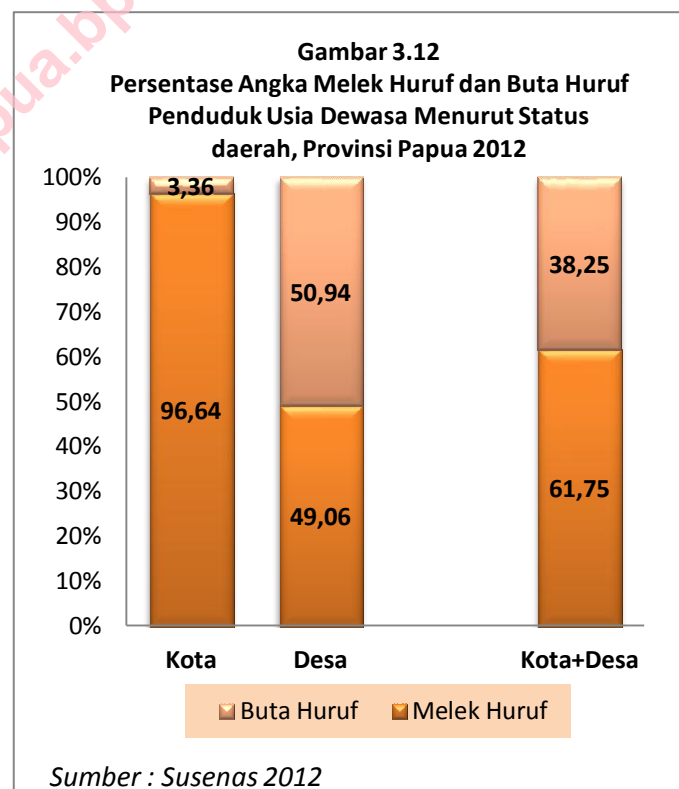
3.4.2 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)

Penduduk usia dewasa merupakan penduduk yang tergolong pada umur 25 tahun ke atas. Pada usia inilah seseorang akan merasakan matang dalam segala hal baik materi maupun nonmateri.

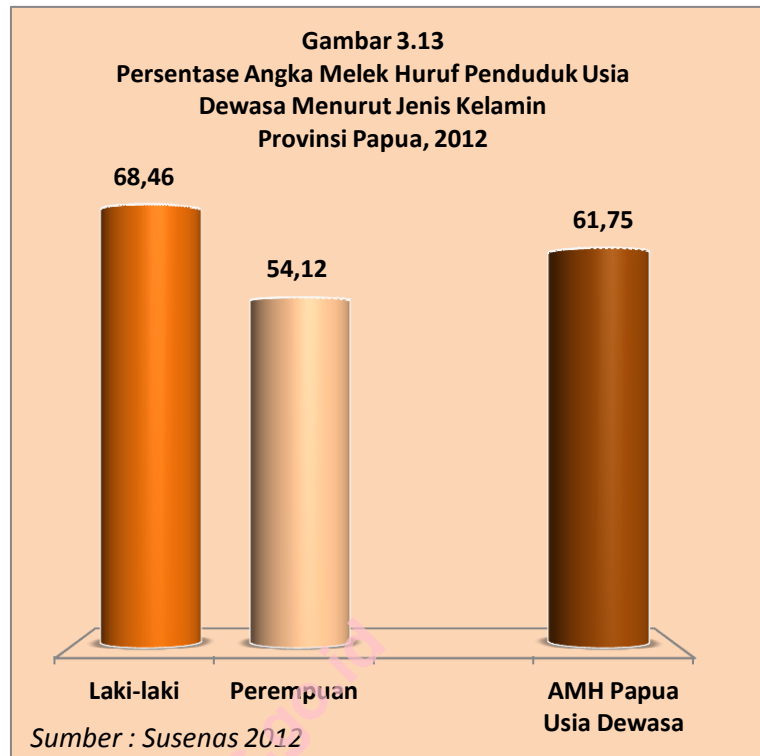
Hasil Susenas tahun 2012, sekitar 61,75 persen penduduk usia dewasa di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 38,25 persen penduduk usia dewasa yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Ditinjau dari status daerah, persentase penduduk usia dewasa yang telah bebas buta huruf di perkotaan sebesar 96,64 persen, sedangkan yang tinggal di perdesaan hanya sebesar 49,06 persen. Artinya penduduk usia dewasa yang telah bebas buta huruf lebih banyak di perkotaan dibanding perdesaan. Dengan kata lain hampir separuh dari penduduk usia dewasa di perdesaan (50,94 %) masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf.

Tingginya angka buta huruf pada usia ini dibanding usia muda diduga karena tinggal sisa kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah

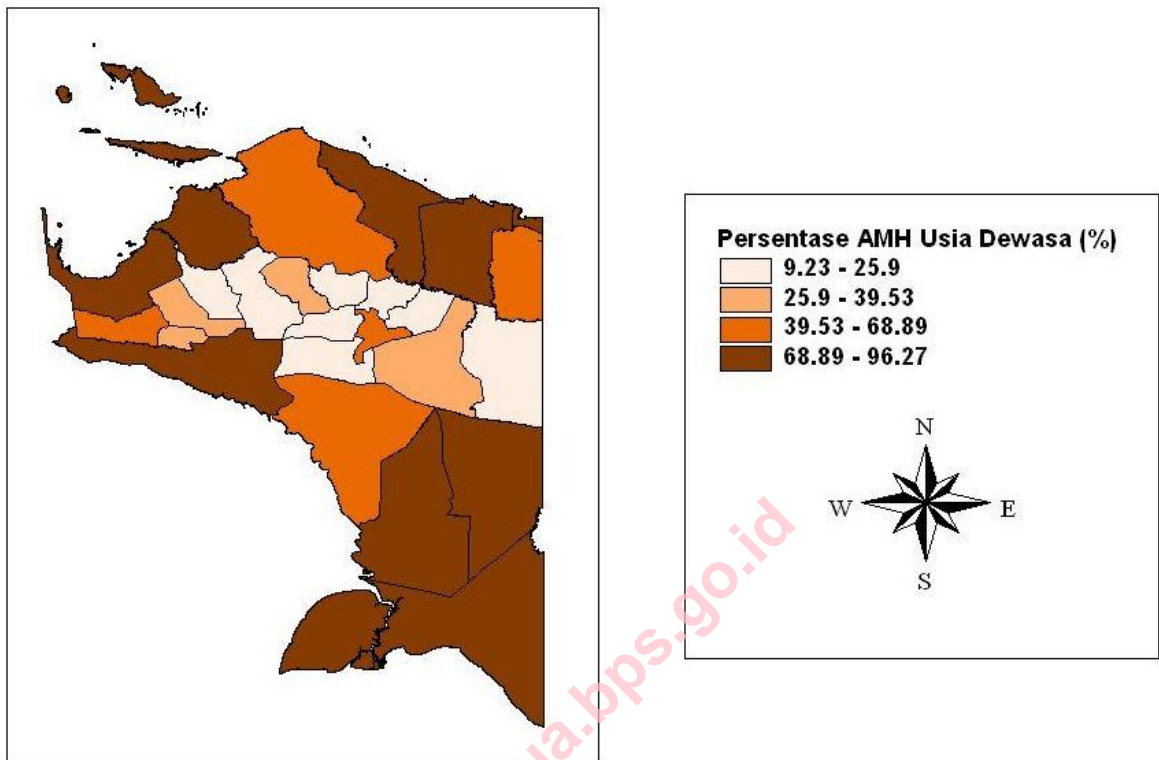
penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Alasan lainnya sama seperti pada usia muda.



Gambar di samping menunjukkan adanya kesenjangan angka melek huruf pada penduduk usia dewasa antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua. Persentase angka melek huruf laki-laki usia dewasa lebih tinggi dari perempuan usia dewasa. Selain itu, angka melek huruf laki-laki usia muda juga berada di atas angka melek huruf penduduk usia dewasa di Provinsi Papua. Fenomena ini menambah sederetan bukti bahwa kesempatan laki-laki untuk menikmati dunia pendidikan lebih besar dibandingkan perempuan baik pendidikan formal maupun non formal.



Gambar 3.14
Persentase Angka Melek Huruf Usia Dewasa, Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber : Susenas 2012 dan SP 2010

Gambar 3.2 memperlihatkan persentase angka melek huruf usia dewasa antar kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2012. Pada usia ini, disparitas angka melek huruf antar kabupaten/kota juga terjadi. Kota Jayapura merupakan daerah yang penduduk usia dewasanya bisa membaca dan menulis huruf latin terbanyak atau angka melek hurufnya tertinggi yaitu sebesar 96,27 persen atau hampir semua penduduk usia dewasanya bisa membaca dan menulis huruf latin. Secara berurutan selain Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Nabire, merupakan kabupaten/kota yang angka melek hurufnya tinggi atau di atas 90 persen. Dengan kata lain, hampir semua penduduk usia dewasanya dapat membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan, kabupaten dengan persentase angka melek hurufnya terendah atau buta hurufnya tertinggi yakni Kabupaten Nduga. Artinya hampir semua penduduk usia dewasa di Kabupaten Nduga belum bisa membaca dan menulis huruf latin.

Tipe daerah di Provinsi Papua terbagi dalam tiga tipe, yakni daerah pegunungan sulit, pesisir sulit dan pesisir mudah. Sehingga dapat digambarkan bahwa persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa yang tinggal di daerah pegunungan sulit berada di bawah 50 persen, kecuali Kabupaten Dogiyai (62,77 %). Sementara itu, penduduk usia dewasa yang tinggal di daerah pesisir sulit memiliki persentase angka melek huruf yang cukup tinggi sekitar di atas 50 persen. Daerah pesisir mudah merupakan wilayah yang tertinggi persentase angka melek hurufnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran

3.4.3 Pendidikan yang Ditamatkan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Secara keseluruhan proporsi penduduk yang belum memiliki pendidikan dasar masih sangat rendah. Pada tahun 2012 terdapat hampir separuh penduduk di Provinsi Papua yang belum punya ijazah (46,91 persen). Dalam kacamata gender, nampak bahwa kaum perempuan lebih banyak yang belum/tidak memiliki ijazah. Demikian juga pada jenjang pendidikan SMP ke atas, persentase perempuan untuk menikmati pendidikan tertinggi selalu lebih rendah dari laki-laki.

Tabel 3.3.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Papua , 2012

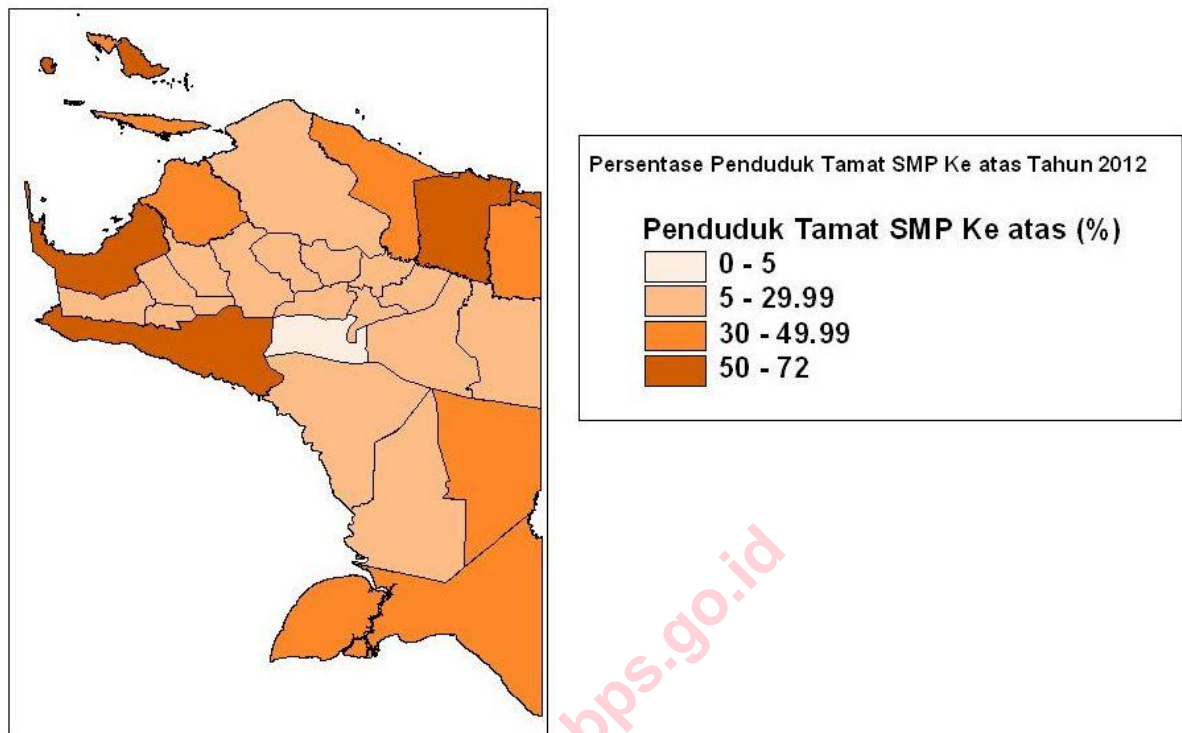
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk Tamat SD	41,3	53,25	46,91
SD	19,63	19,04	19,35
SMP	13,86	10,62	12,34
SMA / SMK	19,79	13,33	16,76
D-/D-2/D-3	1,2	1,25	1,23
D-4/S-1 +	4,22	2,51	3,41
Total	100	100	100

Sumber : Susenas 2012

Gambar 3.12 memperlihatkan perbandingan antar-kabupaten/kota tentang persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan SMP ke atas atau telah menyelesaikan program wajar. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, terdapat 4 kabupaten/kota yang persentase penduduk berijazah SLTP ke atasnya kurang dari 10 persen, yaitu kabupaten-kabupaten yang secara geografis terletak di daerah Pegunungan diantaranya Kabupaten Nduga (1,60%), Kabupaten Pegunungan Bintang (5,86%), Kabupaten Puncak (9,41%), dan Kabupaten Yalimo (9,76%). Sedangkan secara berurutan kabupaten-kabupaten dengan persentase lebih dari 50 persen antara lain Kabupaten Mimika (50,11%), Kabupaten Biak Numfor (50,51%), Kabupaten Nabire (54,78%), Kabupaten Jayapura (56,45%) dan Kota Jayapura (71,81%).

Gambar tersebut juga menunjukkan fenomena yang sering muncul di Provinsi Papua bahwa daerah pegunungan tengah dan daerah pesisir sulit memiliki persentase penduduk yang tamat SMP ke atas berkisar antara 1 % hingga 29,99 %, kecuali Kabupaten Boven Digul yang persentasenya sekitar 42,96 %.

Gambar 3.15
Sebaran Penduduk Usia 10 Tahun Lebih yang Berijazah SMP Ke Atas, Tahun 2012



Sumber : Susenas 2012 dan SP 2010

3.5 Pendidikan Berkeadilan Gender

Dalam rangka menyejajarkan peranan kaum perempuan dan laki-laki pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan berwawasan gender (Program Pendidikan Berwawasan Gender). Program-program pendidikan yang diselenggarakan diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dimana diperlukan adanya kesetaraan peran, partisipasi dan layanan pendidikan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Seperti yang telah dibahas di atas, partisipasi perempuan di Provinsi Papua pada sektor pendidikan baik dilihat dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka melek huruf (AMH), ijazah tertinggi yang dimiliki secara keseluruhan persentasenya masih lebih kecil dari persentase laki-laki. Ini berarti telah terjadi *gap* antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu peranan pemerintah terutama dinas terkait perlu secara berkesinambungan mengadakan sosialisasi, diseminasi serta terus mengadakan pendidikan yang berwawasan gender. Perhatian ini harus dilakukan merata ke seluruh pelosok daerah kabupaten/kota terutama daerah perdesaan. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus meningkat.

3.6 Peningkatan Mutu Pendidikan

Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

3.6.1 Fasilitas Pendidikan

Salah satu standar yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan sarana prasarana. Standar ini dapat dipantau dengan melihat jumlah sarana pendidikan yang tersedia beserta rasio tenaga pendidik dengan murid.

Jumlah sarana pendidikan di Provinsi Papua pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Jumlah sekolah SD sebanyak 2.179 sekolah, SLTP sebanyak 495 sekolah dan jumlah sekolah SLTA sebanyak 268 sekolah. Jumlah sarana pendidikan tersebut termasuk sarana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah (negeri), swasta, ataupun oleh kementerian agama (MTs, MA). Sedangkan jumlah murid yang tercatat di sekolah SD sampai dengan SLTA berturut-turut sebesar 393.795, 99.529, dan 72.287 orang, dengan tenaga pengajar masing-masing seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.
Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Papua, Tahun 2010-2011

JENJANG PENDIDIKAN	Sekolah		Murid		Guru	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	2.134	2.179	374.835	393.795	12.665	12.424
SMP/MTs	479	495	94.466	99.529	4.429	4.517
SMA/SMK/MA	264	268	67.286	72.287	3.760	4.241

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua
 Kantor Depag Provinsi Papua

Indikator jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid tentu saja tidak cukup mempunyai arti jika hanya berupa penjumlahan. Tabel 3.5 menampilkan perkembangan rasio sekolah-guru, sekolah-murid maupun rasio murid- guru keadaan tahun 2010 - 2011. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa rasio sekolah-guru (S-G) pada jenjang SD dan SMP stagnan, yaitu rata-rata 6 guru per SD, dan 9 guru per SMP. Rasio S-G meningkat pada jenjang SM, yaitu dari 14 guru menjadi 16 guru. Penambahan jumlah guru pada jenjang SM diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusannya pendidikan di Papua.

Rasio sekolah murid (S-M) mengindikasikan daya tampung sekolah terhadap murid. Semakin banyak daya tampung sekolah jika tidak dibarengi dengan penambahan jumlah kelas berimplikasi pada ketidaknyamanan proses belajar mengajar. Peningkatan rasio S-M yang tajam juga mengindikasikan kurangnya fasilitas sekolah di suatu wilayah. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa daya tampung sekolah pada tahun 2011 semakin besar pada semua jenjang pendidikan. Pada jenjang SD dan SMP daya tampung sekolah bertambah sedikit (kurang dari 10 siswa per sekolah). Penambahan jumlah siswa paling banyak pada jenjang SM. Jika pada tahun 2010 setiap SM rata-rata menampung sebanyak 255 siswa kini meningkat menjadi 270 siswa atau rata-rata setiap SM bertambah 15 siswa pada tahun 2011.

Tabel 3.5.
Rasio Sekolah-Murid, Guru-Murid dan Rasio Sekolah-Guru pada Jenjang SD, SLTP dan SLTA di Provinsi Papua, Tahun 2010-2011

JENJANG PENDIDIKAN	Rasio Sekolah-Guru		Rasio Sekolah-Murid		Rasio Guru-Murid	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	1 : 6	1 : 6	1 : 176	1 : 181	1 : 30	1 : 32
SMP/MTs	1 : 9	1 : 9	1 : 197	1 : 201	1 : 21	1 : 22
SMA/SMK/MA	1 : 14	1 : 16	1 : 255	1 : 270	1 : 18	1 : 17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua
 Kantor Depag Provinsi Papua (diolah)

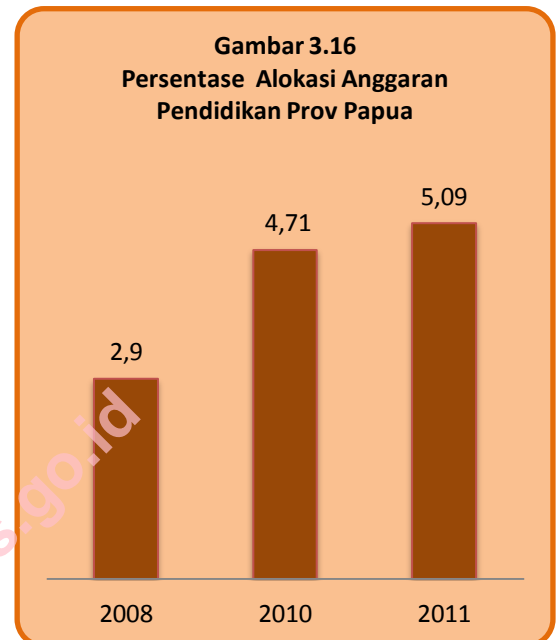
Sementara itu rasio guru-murid menggambarkan beban guru mengawasi murid dalam kegiatan belajar mengajar. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa setiap guru pada jenjang SD mempunyai beban makin meningkat yaitu 30 murid pada tahun 2010 menjadi 32 murid pada tahun 2011. Begitupun pada jenjang SMP beban mengajarnya makin banyak. Sedangkan pada jenjang SM, rata-rata beban guru dalam mengawasi murid berkurang satu.

Bila dilihat dari rasio guru-murid nampak bahwa perkembangan tiap tahun untuk SD dan SLTP mengalami peningkatan, hal ini berarti penambahan jumlah murid lebih cepat dari jumlah guru di Provinsi Papua. Kondisi tersebut akan menghambat perkembangan pendidikan jika pemerintah tidak segera mengimbangi penambahan jumlah murid yang ada dengan penambahan guru.

3.6.2 Pembiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan sektor pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Provinsi Papua dapat tercapai jika ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih memprioritaskan kepada sektor pendidikan, yang secara nasional dialokasikan sebesar 20 persen.

Berdasarkan data laporan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda se-Indonesia yang dihimpun Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan, alokasi anggaran sektor pendidikan Provinsi kian meningkat. Jika pada tahun 2008, sektor pendidikan hanya mendapatkan anggaran sebesar 2,9 persen dari total APBD, pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,71 persen. Peningkatan alokasi anggaran sektor pendidikan berlanjut pada tahun berikutnya. Dari 5,16 triliun APBD Provinsi Papua pada tahun 2011, sebesar 5,09 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Namun demikian walaupun anggaran sektor pendidikan kian meningkat, tetapi masih jauh dari standar yang ditetapkan. Minimnya alokasi anggaran bidang pendidikan merupakan pemicu utama mengapa pembangunan pendidikan di Papua terkesan lambat.



Sumber : Susenas 2011

Selain anggaran pendidikan dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk keperluan pendidikan anaknya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Tersedianya alat tulis, buku-buku pelajar serta peralatan sekolah lainnya dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Berdasarkan data Susenas Tahun 2012, rata-rata pengeluaran per kapita perbulan penduduk di Provinsi Papua sebanyak Rp. 635.579,-. Sebanyak 57,71 persennya (Rp. 366.804,-) digunakan untuk keperluan pemenuhan bahan makanan, sedangkan pengeluaran untuk bahan bukan makanan hanya sebesar 42,29 persen (Rp. 268.775,-). Pengeluaran bahan bukan makanan terbesar digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga (24,06 persen) atau sebesar Rp. 152.909,-. Sedangkan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk sektor pendidikan relatif kecil, yakni 10,88 persen (Rp. 69.147). Sejumlah uang tersebut sebagian dibelanjakan untuk keperluan pendidikan seperti sumbangan pembangunan sekolah (uang pangkal), uang SPP, iuran sekolah lainnya, buku pelajaran dan alat-alat tulis, serta biaya kurus-kurus.



Sumber : Susenas 2012

<http://papua.bps.go.id>

KESIMPULAN
DAN SARAN

4

4.1 Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang Indikator Pendidikan Provinsi Papua, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan masa keemasan anak (*the golden age*). Partisipasi PAUD di Provinsi Papua mencapai 11,27 persen, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EFA) yaitu 75 persen pada tahun 2015. Fasilitas PAUD sebagian besar berada di daerah perkotaan, padahal hampir tiga per empat (74,04 persen) penduduk Papua tinggal di daerah perdesaan. Akibatnya banyak penduduk di perdesaan yang belum bisa menikmati PAUD.
2. Program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum tercapai. Hal ini disebabkan nilai APS kelompok umur 7-12 tahun baru mencapai 75,34 persen dan APS kelompok umur 13-15 tahun juga baru mencapai 68,99 persen, nilai ini masih di bawah target (100 persen). Sama halnya jika dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,69 tahun. Dengan kata lain penduduk di Provinsi Papua baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1 SLTP.
3. Sekitar 76,95 persen penduduk usia muda di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 23,05 persen penduduk usia muda yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf.
4. Pada usia dewasa, sekitar 61,75 persen penduduknya di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan kata lain terdapat 38,25 persen penduduk usia dewasa yang masih belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka melek huruf penduduk pada usia ini lebih kecil dari angka melek huruf penduduk pada usia dewasa.
5. Ditinjau dari ijazah tertinggi yang dimiliki, lebih dari separuh penduduk Papua berpendidikan rendah. Hasil Susenas 2012 mengindikasikan bahwa terdapat

sekitar 66,26 persen penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi Papua berpendidikan SD ke bawah, diantaranya yang tidak tamat SD 46,91 persen dan tamat SD 19,35 persen. Sementara itu penduduk yang berhasil menamatkan pada jenjang SLTP ke atas sebanyak 33,74 persen.

6. Dilihat dari sudut pandang gender, masih terjadi *gap* antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan relatif lebih rendah dari pada laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari angka partisipasi sekolah, ijazah tertinggi yang ditamatkan dan angka melek huruf.

Walaupun data Indikator Pendidikan ini adalah hasil survei yang tentunya masih mengandung *sampling error* namun setidaknya, dapat digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan keadaan pendidikan di Provinsi Papua.

4.2 Saran

Pemerintah selayaknya terus mengembangkan sistem pelayanan umum, terutama di bidang pendidikan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah, karena yang tak terlayani itu umumnya adalah kalangan dari mereka yang tergolong berada di wilayah pedalaman yang notabene belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Juga diperlukan *political will* secara serius guna memperhatikan pemerataan pembangunan pendidikan.

Disamping itu selain jalur pendidikan formal, perlu dimaksimalkan program pendidikan informal seperti pemberantasan buta aksara, PAUD dan lainnya guna menyukseskan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang dicanangkan pemerintah dan mencapai target capaian pembangunan milenium yang tercermin dalam MDG's.

TABEL LAMPIRAN

<http://papua.bps.go.id>

Tabel 1a
Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Papua, 2012

Laki-laki

No	Kabupaten	Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah			Sampel Penduduk Usia 3-6 th
		Ya Pernah	Ya Sedang	Tidak Pernah	
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	11,73	22,52	65,76	80
2	Jayawijaya	[17,76]	[0,00]	[82,24]	27
3	Jayapura	5,07	33,13	61,79	76
4	Nabire	10,11	11,55	78,34	90
5	Kep. Yapen	11,45	7,45	81,10	79
6	Biak Numfor	8,49	9,55	81,96	104
7	Paniai	0,00	1,34	98,66	114
8	Puncak jaya	1,55	1,26	97,19	67
9	Mimika	9,87	8,78	81,34	98
10	Boven Digoel	0,19	6,73	93,06	70
11	Mappi	3,33	0,00	96,67	135
12	Asmat	2,76	0,00	97,23	99
13	Yahukimo	0,00	2,27	97,73	93
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	24
15	Tolikara	0,00	0,00	100,00	68
16	Sarmi	2,20	17,76	80,04	62
17	Keerom	9,91	8,88	81,21	75
18	Waropen	[2,62]	[8,69]	[88,67]	28
19	Supiori	1,10	6,95	91,93	74
20	Memberamo Raya	0,00	0,00	100,00	60
21	Nduga	0,00	0,00	100,00	131
22	Lanny Jaya	0,00	4,69	95,31	75
23	Mamberamo Tengah	0,00	0,00	100,00	58
24	Yalimo	[0,00]	[1,61]	[98,39]	31
25	Puncak	[2,85]	[0,00]	[97,16]	31
26	Dogiyai	0,00	0,00	100,00	78
27	Intan Jaya	0,00	0,00	100,00	57
28	Deiyai	2,35	1,67	95,99	97
29	Kota Jayapura	9,09	2,91	88,00	83
	2012	4,58	5,48	89,94	2.164
	Papua 2011	3,37	6,12	90,51	-
	2010	4,12	7,68	88,21	-

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 1b
Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Papua, 2012

Perempuan

No	Kabupaten	Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah)			Sampel Penduduk Usia 3-6 th
		Ya Pernah	Ya Sedang	Tidak Pernah	
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	9,72	18,63	71,65	89
2	Jayawijaya	[10,52]	[11,23]	[78,25]	26
3	Jayapura	7,69	29,48	62,83	80
4	Nabire	7,21	14,15	78,64	94
5	Kep. Yapen	9,01	8,48	82,51	82
6	Biak Numfor	10,12	10,55	79,33	97
7	Paniai	0,00	0,92	99,08	90
8	Puncak jaya	[0,00]	[10,36]	[89,64]	34
9	Mimika	9,86	5,09	85,05	115
10	Boven Digoel	6,84	15,89	77,27	64
11	Mappi	1,35	0,00	98,65	114
12	Asmat	2,11	0,00	97,89	120
13	Yahukimo	[0,00]	[2,57]	[97,43]	41
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	16
15	Tolikara	0,00	0,00	100,00	53
16	Sarmi	1,97	6,04	91,99	57
17	Keerom	7,40	4,02	88,58	68
18	Waropen	[5,21]	[3,92]	[90,87]	35
19	Supiori	5,45	7,00	87,55	53
20	Memberamo Raya	0,00	0,00	100,00	52
21	Nduga	0,00	1,79	98,21	98
22	Lanny Jaya	0,00	4,52	95,48	51
23	Mamberamo Tengah	0,00	0,00	100,00	52
24	Yalimo	[0,00]	[0,00]	[100,00]	31
25	Puncak	[0,00]	[3,71]	[96,29]	32
26	Dogiyai	0,00	0,00	100,00	69
27	Intan Jaya	[0,00]	[0,00]	[100,00]	33
28	Deiyai	0,00	0,85	99,15	76
29	Kota Jayapura	12,12	11,55	76,33	78
2012		4,80	7,06	88,14	1.900
Papua 2011		5,37	7,72	86,91	-
2010		5,16	7,30	87,54	-

Sumber : Susenas Kor 2012 . * Keterangan : [...] jumlah sampel kurang dari 50

Tabel 1c
Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Papua, 2012

Laki-laki + Perempuan

No	Kabupaten	Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah			Sampel Penduduk Usia 3-6 th
		Ya Pernah	Ya Sedang	Tidak Pernah	
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	10,64	20,42	68,94	169
2	Jayawijaya	14,46	5,11	80,43	53
3	Jayapura	6,35	31,35	62,30	156
4	Nabire	8,61	12,89	78,50	184
5	Kep. Yapen	10,24	7,96	81,80	161
6	Biak Numfor	9,25	10,02	80,73	201
7	Paniai	0,00	1,14	98,86	204
8	Puncak Jaya	0,99	4,53	94,48	101
9	Mimika	9,87	6,65	83,48	213
10	Boven Digoel	3,47	11,25	85,28	134
11	Mappi	2,40	0,00	97,60	249
12	Asmat	2,43	0,00	97,57	219
13	Yahukimo	0,00	2,38	97,62	134
14	Pegunungan Bintang	[0,00]	[0,00]	[100,00]	40
15	Tolikara	0,00	0,00	100,00	121
16	Sarmi	2,08	12,50	85,41	119
17	Keerom	8,76	6,66	84,58	143
18	Waropen	3,89	6,37	89,74	63
19	Supiori	2,89	6,99	90,12	127
20	Memberamo Raya	0,00	0,00	100,00	112
21	Nduga	0,00	0,79	99,21	229
22	Lanny Jaya	0,00	4,62	95,38	126
23	Mamberamo Tengah	0,00	0,00	100,00	110
24	Yalimo	0,00	0,83	99,17	62
25	Puncak	1,37	1,93	96,70	63
26	Dogiyai	0,00	0,00	100,00	147
27	Intan Jaya	0,00	0,00	100,00	90
28	Deiyai	1,26	1,28	97,46	173
29	Kota Jayapura	10,52	6,98	82,49	161
2012		4,68	6,22	89,09	4.064
Papua 2011		4,31	6,87	88,82	-
2010		4,61	7,50	87,89	-

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 2

Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah
Dirinci Menurut Jenisnya, Provinsi Papua, 2012

No	Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Pra Sekolah					Sampel Usia 3-6 Th yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah
		TK/RA / BA	Kelompok Bermain	Tempat Penitipan Anak	Pos PAUD	Satuan PAUD sejenis	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merauke	71,86	0,00	0,59	13,05	14,50	52
2	Jayawijaya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13
3	Jayapura	46,71	2,59	0,20	35,56	14,95	63
4	Nabire	[95,44]	[2,33]	[0,00]	[2,23]	[0,00]	41
5	Kep. Yapen	[54,78]	[0,00]	[0,00]	[14,35]	[30,88]	29
6	Biak Numfor	[77,18]	[0,00]	[0,00]	[9,48]	[13,34]	31
7	Paniai	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3
8	Puncak Jaya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6
9	Mimika	[93,64]	[0,00]	[0,00]	[0,00]	[6,36]	41
10	Boven Digoel	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	22
11	Mappi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
12	Asmat	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
13	Yahukimo	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
15	Tolikara	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
16	Sarmi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	15
17	Keerom	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	20
18	Waropen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7
19	Supiori	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	16
20	Memberamo Raya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
21	Nduga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2
22	Lanny Jaya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
23	Mamberamo Tengah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
24	Yalimo	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1
25	Puncak	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2
26	Dogiyai	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
27	Intan Jaya	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
28	Deiyai	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4
29	Kota Jayapura	88,82	0,00	0,00	9,95	1,22	32
Papua 2012		77,63	1,46	0,41	11,27	9,23	418
2011		74,95	2,01	1,23	11,92	9,90	446

Sumber : Susenas Kor 2012

* Keterangan : [...] jumlah sampel antara 25 s/d 50

* n.a : data tidak dapat ditampilkan (jumlah sampel kurang dari 25)

Tabel 3a
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di Provinsi Papua, 2012

Laki-Laki

No	Kabupaten	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah lagi	Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	1,86	20,15	77,98	600
2	Jayawijaya	30,34	21,14	48,52	198
3	Jayapura	2,60	28,54	68,86	459
4	Nabire	6,93	20,36	72,70	564
5	Kep. Yapen	3,16	28,47	68,37	434
6	Biak Numfor	1,20	27,85	70,95	551
7	Paniai	35,37	26,27	38,37	215
8	Puncak Jaya	51,03	13,76	35,21	134
9	Mimika	5,37	14,32	80,30	548
10	Boven Digoel	3,49	16,73	79,79	358
11	Mappi	9,56	24,72	65,72	348
12	Asmat	24,39	14,43	61,18	308
13	Yahukimo	41,35	18,04	40,61	167
14	Pegunungan Bintang	[83,36]	[3,49]	[13,14]	28
15	Tolikara	47,21	19,74	33,05	171
16	Sarmi	10,94	16,68	72,38	298
17	Keerom	19,82	15,60	64,58	308
18	Waropen	1,66	21,17	77,17	190
19	Supiori	1,06	24,60	74,34	253
20	Memberamo Raya	20,90	18,85	60,24	182
21	Nduga	80,09	7,28	12,62	76
22	Lanny Jaya	50,73	17,30	31,97	173
23	Mamberamo Tengah	52,33	19,81	27,86	99
24	Yalimo	58,24	18,68	23,08	129
25	Puncak	65,30	6,91	27,80	67
26	Dogiyai	21,84	23,34	54,81	324
27	Intan Jaya	54,27	14,22	31,50	116
28	Deiyai	37,62	22,91	39,47	156
29	Kota Jayapura	1,21	25,39	73,40	473
	2012	25,76	19,69	54,56	7.927
	PAPUA 2011	27,85	20,74	51,41	-
	2010	27,88	21,49	50,63	-

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 3b
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di Provinsi Papua, 2012

Perempuan

No	Kabupaten	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah lagi	Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	2,51	25,45	72,05	512
2	Jayawijaya	48,69	18,73	32,58	138
3	Jayapura	3,15	26,67	70,18	420
4	Nabire	10,38	19,28	70,33	505
5	Kep. Yapen	7,72	25,98	66,30	389
6	Biak Numfor	2,29	25,68	72,03	533
7	Paniai	55,82	21,00	23,18	121
8	Puncak Jaya	60,63	15,50	23,87	78
9	Mimika	9,75	17,84	72,41	441
10	Boven Digoel	7,47	19,62	72,91	300
11	Mappi	15,38	19,88	64,74	332
12	Asmat	31,13	13,27	55,60	259
13	Yahukimo	70,18	12,26	17,55	65
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	24
15	Tolikara	72,06	12,98	14,96	62
16	Sarmi	19,49	19,17	61,34	226
17	Keerom	28,90	18,22	52,89	260
18	Waropen	2,03	19,14	78,84	179
19	Supiori	4,94	25,33	69,74	211
20	Memberamo Raya	34,16	15,68	50,16	133
21	Nduga	[91,95]	[2,60]	[5,45]	29
22	Lanny Jaya	[75,16]	[15,15]	[9,69]	47
23	Mamberamo Tengah	[75,50]	[11,69]	[12,81]	40
24	Yalimo	68,54	15,75	15,71	82
25	Puncak	n.a	n.a	n.a	15
26	Dogiyai	33,02	22,38	44,60	259
27	Intan Jaya	[76,03]	[14,13]	[9,84]	35
28	Deiyai	60,90	18,38	20,72	82
29	Kota Jayapura	1,60	27,75	70,65	438
	2012	36,90	18,83	44,27	6.215
	PAPUA 2011	39,74	18,26	42,00	-
	2010	37,20	18,76	44,04	-

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 3c
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di Provinsi Papua, 2012

Laki-laki + Perempuan

No	Kabupaten	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah lagi	Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas
1	2	3	4	5	6
1	Merauke	2,17	22,64	75,19	1112
2	Jayawijaya	39,24	19,97	40,79	336
3	Jayapura	2,85	27,67	69,48	879
4	Nabire	8,52	19,87	71,62	1069
5	Kep. Yapen	5,37	27,27	67,37	823
6	Biak Numfor	1,73	26,80	71,47	1084
7	Paniai	45,24	23,73	31,04	336
8	Puncak jaya	55,43	14,55	30,01	212
9	Mimika	7,22	15,81	76,97	989
10	Boven Digoel	5,29	18,04	76,67	658
11	Mappi	12,34	22,41	65,25	680
12	Asmat	27,59	13,83	58,53	567
13	Yahukimo	55,40	15,23	29,38	232
14	Pegunungan Bintang	83,45	3,39	13,16	52
15	Tolikara	58,62	16,64	24,74	233
16	Sarmi	14,72	17,78	67,50	524
17	Keerom	24,00	16,80	59,19	568
18	Waropen	1,83	20,22	77,95	369
19	Supiori	2,90	24,94	72,16	464
20	Memberamo Raya	27,05	17,38	55,57	315
21	Nduga	85,59	5,11	9,29	105
22	Lanny Jaya	62,49	16,27	21,25	220
23	Mamberamo Tengah	63,20	16,00	20,80	139
24	Yalimo	63,03	17,32	19,65	211
25	Puncak	73,42	8,19	18,39	82
26	Dogiyai	27,43	22,86	49,71	583
27	Intan Jaya	65,06	14,18	20,76	151
28	Deiyai	49,09	20,68	30,23	238
29	Kota Jayapura	1,40	26,49	72,12	911
	2012	30,99	19,28	49,72	14.142
	PAPUA 2011	33,47	19,57	46,96	-
	2010	32,33	20,19	47,48	-

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 4a
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Papua Tahun 2012

Laki-laki

No	Kabupaten	Tidak mempunyai ijazah	SD/MI/Paket A	SLTP/MTs /Paket B	SMU/SMK/MA/Paket C	Diploma I-III	Universitas DIV/S1-S3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merauke	23,54	29,43	20,93	21,01	1,40	3,08
2	Jayawijaya	49,90	16,65	14,41	11,42	0,68	4,71
3	Jayapura	18,24	22,34	18,75	33,82	1,79	4,57
4	Nabire	21,53	21,25	20,36	28,38	2,18	5,59
5	Kep. Yapen	23,27	24,20	16,85	27,88	2,25	4,65
6	Biak Numfor	22,79	22,60	17,09	28,62	2,54	6,29
7	Paniai	45,62	19,16	16,36	16,00	0,56	1,98
8	Puncak Jaya	63,50	14,74	10,74	4,59	1,66	5,31
9	Mimika	19,53	21,45	18,77	33,68	1,84	5,23
10	Boven Digoel	24,44	22,86	15,07	29,96	2,24	5,51
11	Mappi	50,11	24,70	12,89	9,27	0,00	1,98
12	Asmat	64,77	18,70	8,50	6,06	0,58	1,61
13	Yahukimo	65,52	18,38	7,15	6,94	0,72	0,91
14	Pegunungan Bintang	[74,58]	[9,28]	[7,74]	[6,58]	[1,08]	[1,26]
15	Tolikara	61,75	15,23	7,92	13,03	0,39	1,18
16	Sarmi	36,48	24,82	14,75	19,32	0,69	2,43
17	Keerom	38,39	22,45	15,20	21,67	0,77	1,39
18	Waropen	23,24	23,10	22,67	21,68	2,39	5,50
19	Supiori	29,14	33,75	16,84	18,21	1,70	1,50
20	Memberamo Raya	51,27	26,96	8,04	10,79	0,62	1,26
21	Nduga	88,52	7,10	2,54	1,43	0,00	0,00
22	Lanny Jaya	63,55	15,42	9,45	9,49	0,30	1,91
23	Mamberamo Tengah	69,94	12,99	7,27	8,34	0,07	1,45
24	Yalimo	76,73	10,38	5,90	6,86	0,28	0,13
25	Puncak	82,28	8,83	6,64	2,25	0,00	0,00
26	Dogiyai	50,63	31,64	10,52	5,51	0,54	0,62
27	Intan Jaya	74,16	8,87	5,75	8,14	0,20	2,37
28	Deiyai	56,30	13,38	16,78	12,15	0,86	0,73
29	Kota Jayapura	11,23	14,32	15,58	43,58	2,52	11,93
	2012	41,30	19,63	13,86	19,79	1,20	4,22
	PAPUA 2011	43,84	18,73	13,56	18,52	1,60	3,75
	2010	41,39	18,04	15,75	18,93	1,57	4,32

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 4b
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Papua Tahun 2012

Perempuan

No	Kabupaten	Tidak mempunyai ijazah	SD/MI/Paket A	SLTP/MTs/Paket B	SMU/SMK/MA/Paket C	Diploma I-III	Universitas DIV/S1-S3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merauke	22,85	30,76	19,03	21,77	1,92	3,68
2	Jayawijaya	64,12	15,23	5,78	10,59	1,50	2,77
3	Jayapura	18,67	30,04	20,79	26,20	1,58	2,72
4	Nabire	28,27	22,14	17,44	24,89	2,18	5,08
5	Kep. Yapen	30,80	25,73	14,88	21,75	2,05	4,79
6	Biak Numfor	27,39	25,82	15,86	25,31	1,38	4,25
7	Paniai	66,44	15,21	11,47	6,26	0,25	0,37
8	Puncak Jaya	72,52	17,48	3,60	3,80	1,42	1,18
9	Mimika	27,91	29,10	15,84	21,35	1,65	4,15
10	Boven Digoel	32,75	28,51	18,01	16,80	1,89	2,04
11	Mappi	55,34	28,29	10,88	4,02	0,46	1,02
12	Asmat	67,39	20,10	5,67	5,64	0,54	0,67
13	Yahukimo	83,20	11,71	1,76	2,11	0,60	0,62
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
15	Tolikara	78,64	11,99	5,62	3,75	0,00	0,00
16	Sarmi	40,25	27,69	15,27	12,58	1,22	2,99
17	Keerom	51,38	21,41	16,60	8,74	0,13	1,75
18	Waropen	37,61	26,55	16,72	14,50	2,44	2,17
19	Supiori	33,83	36,27	15,05	12,24	0,92	1,69
20	Memberamo Raya	63,59	26,90	5,27	3,48	0,75	0,00
21	Nduga	[97,24]	[1,98]	[0,55]	[0,22]	[0,00]	[0,00]
22	Lanny Jaya	[88,01]	[7,74]	[3,28]	[0,97]	[0,00]	[0,00]
23	Mamberamo Tengah	[86,36]	[8,18]	[3,07]	[2,39]	[0,00]	[0,00]
24	Yalimo	83,45	9,15	6,06	0,99	0,35	0,00
25	Puncak	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
26	Dogiyai	54,68	36,39	7,29	1,27	0,38	0,00
27	Intan Jaya	[89,11]	[7,98]	[1,33]	[1,58]	[0,00]	[0,00]
28	Deiyai	73,00	9,54	6,17	9,69	0,00	1,60
29	Kota Jayapura	12,17	18,51	18,16	38,17	4,11	8,87
	2012	53,25	19,04	10,62	13,33	1,25	2,51
	PAPUA 2011	55,48	17,46	10,79	12,07	1,49	2,71
	2010	50,10	18,03	14,00	13,68	1,79	2,41

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 4c
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Papua Tahun 2012

Laki-Laki + Perempuan

No	Kabupaten	Tidak mempunyai ijazah	SD/MI/Paket A	SLTP/MTs/Paket B	SMU/SMK/MA/Paket C	Diploma I-III	Universitas DIV/S1-S3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merauke	21,02	30,29	18,32	23,69	1,64	5,03
2	Jayawijaya	54,77	16,21	9,35	13,26	1,08	5,33
3	Jayapura	17,08	26,47	19,76	31,15	1,69	3,85
4	Nabire	24,55	20,67	18,07	28,39	2,18	6,14
5	Kep. Yapen	26,28	24,87	17,37	23,80	2,16	5,52
6	Biak Numfor	24,66	24,82	16,32	27,08	1,98	5,13
7	Paniai	56,89	16,77	13,37	11,23	0,41	1,32
8	Puncak Jaya	66,36	17,76	6,61	6,25	1,55	1,48
9	Mimika	22,13	27,76	15,70	27,50	1,76	5,14
10	Boven Digoel	29,80	27,24	15,70	22,18	2,08	3,01
11	Mappi	52,21	26,43	14,11	5,86	0,22	1,18
12	Asmat	62,81	20,41	8,44	6,74	0,56	1,03
13	Yahukimo	71,30	14,96	6,33	5,30	0,66	1,45
14	Pegunungan Bintang	89,97	4,17	4,15	1,13	0,58	0,00
15	Tolikara	67,10	13,01	8,39	10,66	0,21	0,63
16	Sarmi	33,53	26,95	19,02	16,86	0,93	2,66
17	Keerom	44,46	20,94	18,29	14,38	0,48	1,45
18	Waropen	31,61	25,06	17,64	20,32	2,42	2,95
19	Supiori	35,44	30,10	15,63	15,75	1,33	1,76
20	Memberamo Raya	55,91	28,10	7,53	6,70	0,68	1,08
21	Nduga	94,78	3,62	1,29	0,31	0,00	0,00
22	Lanny Jaya	74,26	12,51	6,71	5,61	0,16	0,76
23	Mamberamo Tengah	75,76	11,77	7,44	4,81	0,04	0,19
24	Yalimo	79,75	10,49	6,15	2,83	0,32	0,46
25	Puncak	80,09	10,50	4,63	4,26	0,16	0,36
26	Dogiyai	48,28	36,24	11,53	3,40	0,46	0,10
27	Intan Jaya	77,08	12,00	5,42	4,74	0,10	0,67
28	Deiyai	63,16	9,73	10,90	12,01	0,44	3,77
29	Kota Jayapura	11,59	16,60	17,64	41,07	3,26	9,83
	2012	46,91	19,35	12,34	16,76	1,22	3,41
	PAPUA 2011	49,34	18,13	12,25	15,47	1,55	3,26
	2010	45,55	18,03	14,19	16,42	1,67	3,41

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 5a
Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Laki-laki

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	3,38	96,62	194
2	Jayawijaya	19,96	80,04	75
3	Jayapura	3,20	96,80	189
4	Nabire	6,39	93,61	173
5	Kep. Yapen	6,97	93,03	136
6	Biak Numfor	0,55	99,45	178
7	Paniai	25,22	74,78	87
8	Puncak jaya	37,81	62,19	78
9	Mimika	6,56	93,44	131
10	Boven Digoel	2,97	97,03	103
11	Mappi	9,52	90,48	126
12	Asmat	28,11	71,89	117
13	Yahukimo	28,49	71,51	72
14	Pegunungan Bintang	[76,34]	[23,66]	[37]
15	Tolikara	28,43	71,57	94
16	Sarmi	13,18	86,82	93
17	Keerom	14,36	85,64	111
18	Waropen	[0,00]	[100,00]	[42]
19	Supiori	5,68	94,32	91
20	Memberamo Raya	12,91	87,09	56
21	Nduga	76,46	23,54	102
22	Lanny Jaya	44,44	55,56	79
23	Mamberamo Tengah	38,03	61,97	58
24	Yalimo	47,01	52,99	131
25	Puncak	59,83	40,17	57
26	Dogiyai	5,10	94,90	113
27	Intan Jaya	44,55	55,45	76
28	Deiyai	13,59	86,41	58
29	Kota Jayapura	0,92	99,08	159
PAPUA		18,78	81,22	3.016

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 5b
Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perempuan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	0,67	99,33	152
2	Jayawijaya	37,65	62,35	81
3	Jayapura	1,17	98,83	145
4	Nabire	5,97	94,03	178
5	Kep. Yapen	6,52	93,48	134
6	Biak Numfor	2,18	97,82	174
7	Paniai	38,74	61,26	88
8	Puncak Jaya	[24,87]	[75,13]	[34]
9	Mimika	13,34	86,66	124
10	Boven Digoel	3,46	96,54	96
11	Mappi	8,85	91,15	132
12	Asmat	42,26	57,74	121
13	Yahukimo	65,66	34,34	81
14	Pegunungan Bintang	[62,57]	[37,43]	[31]
15	Tolikara	56,49	43,51	74
16	Sarmi	17,60	82,40	82
17	Keerom	16,87	83,13	117
18	Waropen	[3,12]	[96,88]	[40]
19	Supiori	3,76	96,24	65
20	Memberamo Raya	26,56	73,44	61
21	Nduga	89,84	10,16	80
22	Lanny Jaya	66,06	33,94	90
23	Mamberamo Tengah	65,18	34,82	59
24	Yalimo	55,70	44,30	119
25	Puncak	66,51	33,49	65
26	Dogiyai	28,63	71,37	124
27	Intan Jaya	67,77	32,23	70
28	Deiyai	24,60	75,40	54
29	Kota Jayapura	0,00	100,00	138
PAPUA		27,76	72,24	2.809

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 5c
Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Laki-laki + Perempuan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	2,18	97,82	346
2	Jayawijaya	29,03	70,97	156
3	Jayapura	2,35	97,65	334
4	Nabire	6,19	93,81	351
5	Kep. Yapen	6,75	93,25	270
6	Biak Numfor	1,36	98,64	352
7	Paniai	32,04	67,96	175
8	Puncak Jaya	33,29	66,71	112
9	Mimika	9,64	90,36	255
10	Boven Digoel	3,19	96,81	199
11	Mappi	9,20	90,80	258
12	Asmat	35,18	64,82	238
13	Yahukimo	50,24	49,76	153
14	Pegunungan Bintang	70,44	29,56	68
15	Tolikara	41,32	58,68	168
16	Sarmi	15,00	85,00	175
17	Keerom	15,56	84,44	228
18	Waropen	1,54	98,46	82
19	Supiori	4,80	95,20	156
20	Memberamo Raya	20,06	79,94	117
21	Nduga	82,21	17,79	182
22	Lanny Jaya	55,36	44,64	169
23	Mamberamo Tengah	52,50	47,50	117
24	Yalimo	50,86	49,14	250
25	Puncak	63,16	36,84	122
26	Dogiyai	17,46	82,54	237
27	Intan Jaya	56,74	43,26	146
28	Deiyai	19,00	81,00	112
29	Kota Jayapura	0,50	99,50	297
PAPUA		23,05	76,95	5.825

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 6a
Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Laki-laki

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	6,65	93,35	478
2	Jayawijaya	35,93	64,07	234
3	Jayapura	3,64	96,36	398
4	Nabire	7,26	92,74	506
5	Kep. Yapen	6,89	93,11	380
6	Biak Numfor	4,29	95,71	468
7	Paniai	47,13	52,87	340
8	Puncak jaya	60,77	39,23	250
9	Mimika	6,05	93,95	480
10	Boven Digoel	4,68	95,32	302
11	Mappi	13,20	86,80	296
12	Asmat	35,24	64,76	298
13	Yahukimo	51,41	48,59	268
14	Pegunungan Bintang	83,36	16,64	119
15	Tolikara	62,02	37,98	311
16	Sarmi	11,53	88,47	282
17	Keerom	23,42	76,58	329
18	Waropen	8,86	91,14	158
19	Supiori	7,59	92,41	198
20	Memberamo Raya	31,72	68,28	188
21	Nduga	87,03	12,97	413
22	Lanny Jaya	59,63	40,37	331
23	Mamberamo Tengah	64,79	35,21	260
24	Yalimo	73,92	26,08	342
25	Puncak	66,33	33,67	155
26	Dogiyai	31,88	68,12	344
27	Intan Jaya	63,80	36,20	246
28	Deiyai	49,35	50,65	300
29	Kota Jayapura	2,95	97,05	416
2012		31,54	68,46	9.090

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 6b
Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perempuan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	6,78	93,22	463
2	Jayawijaya	55,86	44,14	223
3	Jayapura	6,30	93,70	379
4	Nabire	12,19	87,81	463
5	Kep. Yapen	13,37	86,63	348
6	Biak Numfor	5,30	94,70	447
7	Paniai	74,72	25,28	339
8	Puncak jaya	75,91	24,09	234
9	Mimika	10,39	89,61	396
10	Boven Digoel	12,50	87,50	257
11	Mappi	24,53	75,47	284
12	Asmat	49,05	50,95	267
13	Yahukimo	80,29	19,71	226
14	Pegunungan Bintang	85,56	14,44	90
15	Tolikara	87,27	12,73	296
16	Sarmi	26,41	73,59	238
17	Keerom	41,01	58,99	307
18	Waropen	12,75	87,25	152
19	Supiori	13,52	86,48	174
20	Memberamo Raya	51,16	48,84	161
21	Nduga	95,05	4,95	369
22	Lanny Jaya	90,30	9,70	293
23	Mamberamo Tengah	90,31	9,69	244
24	Yalimo	85,01	14,99	341
25	Puncak	97,52	2,48	122
26	Dogiyai	42,60	57,40	333
27	Intan Jaya	90,86	9,14	222
28	Deiyai	78,21	21,79	317
29	Kota Jayapura	4,60	95,40	402
2012		45,88	54,12	8.387

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 6c
Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Laki-laki + Perempuan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	6,71	93,29	941
2	Jayawijaya	45,59	54,41	457
3	Jayapura	4,91	95,09	777
4	Nabire	9,49	90,51	969
5	Kep. Yapen	10,01	89,99	728
6	Biak Numfor	4,78	95,22	915
7	Paniai	60,47	39,53	679
8	Puncak Jaya	67,94	32,06	484
9	Mimika	7,80	92,20	876
10	Boven Digoel	8,13	91,87	559
11	Mappi	18,67	81,33	580
12	Asmat	41,72	58,28	565
13	Yahukimo	64,70	35,30	494
14	Pegunungan Bintang	84,39	15,61	209
15	Tolikara	74,10	25,90	607
16	Sarmi	18,02	81,98	520
17	Keerom	31,11	68,89	636
18	Waropen	10,70	89,30	310
19	Supiori	10,32	89,68	372
20	Memberamo Raya	40,58	59,42	349
21	Nduga	90,77	9,23	782
22	Lanny Jaya	74,34	25,66	624
23	Mamberamo Tengah	76,73	23,27	504
24	Yalimo	79,37	20,63	683
25	Puncak	80,90	19,10	277
26	Dogiyai	37,23	62,77	677
27	Intan Jaya	76,87	23,13	468
28	Deiyai	63,61	36,39	617
29	Kota Jayapura	3,73	96,27	818
2012		38,25	61,75	17.477

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 7a
Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perkotaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	0,80	99,20	151
2	Jayawijaya	[10,77]	[89,23]	[40]
3	Jayapura	0,00	100,00	145
4	Nabire	0,47	99,53	194
5	Kep. Yapen	3,22	96,78	145
6	Biak Numfor	0,00	100,00	142
7	Paniai	n.a	n.a	n.a
8	Puncak jaya	n.a	n.a	n.a
9	Mimika	5,02	94,98	170
10	Boven Digoel	2,16	97,84	57
11	Mappi	n.a	n.a	n.a
12	Asmat	n.a	n.a	n.a
13	Yahukimo	n.a	n.a	n.a
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
15	Tolikara	n.a	n.a	n.a
16	Sarmi	n.a	n.a	n.a
17	Keerom	n.a	n.a	n.a
18	Waropen	n.a	n.a	n.a
19	Supiori	n.a	n.a	n.a
20	Memberamo Raya	n.a	n.a	n.a
21	Nduga	n.a	n.a	n.a
22	Lanny Jaya	n.a	n.a	n.a
23	Mamberamo Tengah	n.a	n.a	n.a
24	Yalimo	n.a	n.a	n.a
25	Puncak	n.a	n.a	n.a
26	Dogiyai	n.a	n.a	n.a
27	Intan Jaya	n.a	n.a	n.a
28	Deiyai	n.a	n.a	n.a
29	Kota Jayapura	0,00	100,00	258
	2012	2,06	97,94	1.379

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 7b
Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perdesaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	3,36	96,64	195
2	Jayawijaya	32,45	67,55	116
3	Jayapura	4,01	95,99	189
4	Nabire	12,14	87,86	157
5	Kep. Yapen	10,30	89,70	125
6	Biak Numfor	2,48	97,52	210
7	Paniai	32,04	67,96	175
8	Puncak jaya	33,29	66,71	112
9	Mimika	15,87	84,13	85
10	Boven Digoel	3,53	96,47	142
11	Mappi	10,18	89,82	239
12	Asmat	35,58	64,42	219
13	Yahukimo	53,55	46,45	134
14	Pegunungan Bintang	70,44	29,56	68
15	Tolikara	41,32	58,68	168
16	Sarmi	17,24	82,76	155
17	Keerom	15,56	84,44	228
18	Waropen	1,54	98,46	82
19	Supiori	4,80	95,20	156
20	Memberamo Raya	20,06	79,94	117
21	Nduga	82,21	17,79	182
22	Lanny Jaya	55,36	44,64	169
23	Mamberamo Tengah	52,50	47,50	117
24	Yalimo	50,86	49,14	250
25	Puncak	63,16	36,84	122
26	Dogiyai	17,46	82,54	237
27	Intan Jaya	56,74	43,26	146
28	Deiyai	19,00	81,00	112
29	Kota Jayapura	[3,91]	[96,09]	[39]
2012		31,21	68,79	4.446

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 7c
Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perkotaan + Perdesaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 15-24
1	2	3	4	5
1	Merauke	2,18	97,82	346
2	Jayawijaya	29,03	70,97	156
3	Jayapura	2,35	97,65	334
4	Nabire	6,19	93,81	351
5	Kep. Yapen	6,75	93,25	270
6	Biak Numfor	1,36	98,64	352
7	Paniai	32,04	67,96	175
8	Puncak Jaya	33,29	66,71	112
9	Mimika	9,64	90,36	255
10	Boven Digoel	3,19	96,81	199
11	Mappi	9,20	90,80	258
12	Asmat	35,18	64,82	238
13	Yahukimo	50,24	49,76	153
14	Pegunungan Bintang	70,44	29,56	68
15	Tolikara	41,32	58,68	168
16	Sarmi	15,00	85,00	175
17	Keerom	15,56	84,44	228
18	Waropen	1,54	98,46	82
19	Supiori	4,80	95,20	156
20	Memberamo Raya	20,06	79,94	117
21	Nduga	82,21	17,79	182
22	Lanny Jaya	55,36	44,64	169
23	Mamberamo Tengah	52,50	47,50	117
24	Yalimo	50,86	49,14	250
25	Puncak	63,16	36,84	122
26	Dogiyai	17,46	82,54	237
27	Intan Jaya	56,74	43,26	146
28	Deiyai	19,00	81,00	112
29	Kota Jayapura	0,50	99,50	297
2012		23,05	76,95	5.825

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 8a
Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perkotaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	3,64	96,36	387
2	Jayawijaya	1,78	98,22	164
3	Jayapura	5,51	94,49	341
4	Nabire	1,50	98,50	504
5	Kep. Yapen	4,23	95,77	392
6	Biak Numfor	4,65	95,35	391
7	Paniai	n.a	n.a	n.a
8	Puncak jaya	n.a	n.a	n.a
9	Mimika	2,69	97,31	687
10	Boven Digoel	1,36	98,64	140
11	Mappi	6,97	93,03	68
12	Asmat	21,95	78,05	55
13	Yahukimo	n.a	n.a	n.a
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
15	Tolikara	n.a	n.a	n.a
16	Sarmi	6,56	93,44	68
17	Keerom	n.a	n.a	n.a
18	Waropen	n.a	n.a	n.a
19	Supiori	n.a	n.a	n.a
20	Memberamo Raya	n.a	n.a	n.a
21	Nduga	n.a	n.a	n.a
22	Lanny Jaya	n.a	n.a	n.a
23	Mamberamo Tengah	n.a	n.a	n.a
24	Yalimo	n.a	n.a	n.a
25	Puncak	n.a	n.a	n.a
26	Dogiyai	n.a	n.a	n.a
27	Intan Jaya	n.a	n.a	n.a
28	Deiyai	n.a	n.a	n.a
29	Kota Jayapura	2,74	97,26	745
2012		3,36	96,64	3.969

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 8b
Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perdesaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	9,15	90,85	554
2	Jayawijaya	57,35	42,65	293
3	Jayapura	4,42	95,58	436
4	Nabire	16,41	83,59	465
5	Kep. Yapen	14,69	85,31	336
6	Biak Numfor	4,89	95,11	524
7	Paniai	60,47	39,53	679
8	Puncak jaya	67,94	32,06	484
9	Mimika	19,54	80,46	189
10	Boven Digoel	10,22	89,78	419
11	Mappi	20,27	79,73	512
12	Asmat	45,34	54,66	510
13	Yahukimo	66,24	33,76	467
14	Pegunungan Bintang	84,39	15,61	209
15	Tolikara	74,10	25,90	607
16	Sarmi	20,65	79,35	452
17	Keerom	31,11	68,89	636
18	Waropen	10,70	89,30	310
19	Supiori	10,32	89,68	372
20	Memberamo Raya	40,58	59,42	349
21	Nduga	90,77	9,23	782
22	Lanny Jaya	74,34	25,66	624
23	Mamberamo Tengah	76,73	23,27	504
24	Yalimo	79,37	20,63	683
25	Puncak	80,90	19,10	277
26	Dogiyai	37,23	62,77	677
27	Intan Jaya	76,87	23,13	468
28	Deiyai	63,61	36,39	617
29	Kota Jayapura	14,93	85,07	73
2012		50,94	49,06	13.508

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 8c
Persentase Penduduk Usia Muda(25 Tahun Ke atas)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2012

Perkotaan+Perdesaan

No	Kabupaten	Buta Huruf	Melek Huruf	Sampel Usia 25 Tahun >
1	2	3	4	5
1	Merauke	6,71	93,29	941
2	Jayawijaya	45,59	54,41	457
3	Jayapura	4,91	95,09	777
4	Nabire	9,49	90,51	969
5	Kep. Yapen	10,01	89,99	728
6	Biak Numfor	4,78	95,22	915
7	Paniai	60,47	39,53	679
8	Puncak jaya	67,94	32,06	484
9	Mimika	7,80	92,20	876
10	Boven Digoel	8,13	91,87	559
11	Mappi	18,67	81,33	580
12	Asmat	41,72	58,28	565
13	Yahukimo	64,70	35,30	494
14	Pegunungan Bintang	84,39	15,61	209
15	Tolikara	74,10	25,90	607
16	Sarmi	18,02	81,98	520
17	Keerom	31,11	68,89	636
18	Waropen	10,70	89,30	310
19	Supiori	10,32	89,68	372
20	Memberamo Raya	40,58	59,42	349
21	Nduga	90,77	9,23	782
22	Lanny Jaya	74,34	25,66	624
23	Mamberamo Tengah	76,73	23,27	504
24	Yalimo	79,37	20,63	683
25	Puncak	80,90	19,10	277
26	Dogiyai	37,23	62,77	677
27	Intan Jaya	76,87	23,13	468
28	Deiyai	63,61	36,39	617
29	Kota Jayapura	3,73	96,27	818
2012		38,25	61,75	17.477

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 9
Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2012

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			Sampel		
		7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merauke	92,19	86,79	61,45	266	122	127
2	Jayawijaya	77,96	67,75	50,34	147	61	50
3	Jayapura	94,97	85,97	83,81	278	124	111
4	Nabire	80,74	82,83	59,02	292	127	96
5	Kep. Yapen	94,14	87,68	71,83	286	125	97
6	Biak Numfor	94,19	89,06	75,00	370	146	115
7	Paniai	84,72	81,39	61,37	209	59	65
8	Puncak jaya	66,11	69,39	[25,51]	201	94	45
9	Mimika	88,79	79,81	57,12	288	121	73
10	Boven Digoel	85,42	80,27	48,48	170	69	70
11	Mappi	88,72	74,20	31,66	285	98	86
12	Asmat	62,33	44,08	23,98	228	76	63
13	Yahukimo	67,61	51,63	[41,44]	193	57	43
14	Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	79	20	17
15	Tolikara	65,44	78,24	33,88	231	99	51
16	Sarmi	82,66	80,01	58,68	152	55	61
17	Keerom	69,52	66,51	55,00	206	97	77
18	Waropen	90,48	[89,50]	[53,44]	109	30	27
19	Supiori	88,89	79,75	61,44	174	70	57
20	Memberamo Raya	77,98	[50,84]	[28,30]	168	44	38
21	Nduga	22,02	13,63	1,80	383	140	59
22	Lanny Jaya	71,91	61,93	28,68	244	84	59
23	Mamberamo Tengah	71,83	49,86	[33,88]	210	74	37
24	Yalimo	74,56	52,47	25,21	213	152	119
25	Puncak	37,74	[20,48]	[23,86]	77	39	34
26	Dogiyai	81,72	70,42	48,20	257	109	64
27	Intan Jaya	58,52	45,82	22,12	183	62	63
28	Deiyai	87,97	89,04	[68,32]	194	63	49
29	Kota Jayapura	97,32	99,52	77,76	269	91	103
2012		75,34	68,99	50,66	6.362	2.508	1.956

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 10
Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2012

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		SD	SMP	SMA
1	2	3	4	5
1	Merauke	112,42	78,06	56,14
2	Jayawijaya	86,56	78,40	43,59
3	Jayapura	101,07	97,84	82,36
4	Nabire	92,90	64,05	82,54
5	Kep. Yapen	97,04	106,66	55,01
6	Biak Numfor	107,63	100,90	78,03
7	Paniai	87,03	113,09	39,77
8	Puncak jaya	79,29	56,89	[13,96]
9	Mimika	99,18	87,55	59,25
10	Boven Digoel	104,19	79,17	43,28
11	Mappi	109,74	47,95	22,82
12	Asmat	76,48	18,67	13,70
13	Yahukimo	74,99	48,87	[17,32]
14	Pegunungan Bintang	10,96	n.a	n.a
15	Tolikara	67,29	79,36	34,17
16	Sarmi	93,30	87,81	56,43
17	Keerom	83,83	53,46	65,34
18	Waropen	96,57	[92,58]	[51,58]
19	Supiori	108,33	95,67	54,32
20	Memberamo Raya	91,32	[37,10]	[9,96]
21	Nduga	25,52	6,59	0,00
22	Lanny Jaya	77,16	56,94	18,30
23	Mamberamo Tengah	74,31	43,07	[34,51]
24	Yalimo	92,54	35,91	10,48
25	Puncak	44,64	[26,03]	[13,99]
26	Dogiyai	95,12	60,39	22,02
27	Intan Jaya	66,15	44,38	3,88
28	Deiyai	102,94	89,61	[59,78]
29	Kota Jayapura	96,44	139,13	81,24
2012		84,16	70,99	44,48
PAPUA 2011		84,59	68,69	47,69
2010		93,27	60,05	48,20

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 11
Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2012

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Murni (APM)		
		SD	SMP	SMA
1	2	3	4	5
1	Merauke	88,85	45,89	39,25
2	Jayawijaya	72,90	51,56	30,99
3	Jayapura	90,76	67,38	56,36
4	Nabire	75,87	42,39	45,84
5	Kep. Yapen	86,53	64,52	37,01
6	Biak Numfor	84,01	57,27	52,70
7	Paniai	79,39	73,79	34,61
8	Puncak jaya	62,68	36,69	[4,24]
9	Mimika	79,50	52,16	44,53
10	Boven Digoel	80,91	35,35	21,00
11	Mappi	85,95	18,28	7,96
12	Asmat	62,33	9,36	10,33
13	Yahukimo	65,12	24,13	[16,49]
14	Pegunungan Bintang	9,13	n.a	n.a
15	Tolikara	60,34	62,82	25,48
16	Sarmi	79,08	49,46	31,58
17	Keerom	66,18	33,09	38,00
18	Waropen	86,36	[60,93]	[35,31]
19	Supiori	82,82	49,21	25,38
20	Memberamo Raya	77,98	[18,20]	[6,85]
21	Nduga	21,55	4,45	0,00
22	Lanny Jaya	71,53	48,39	18,30
23	Mamberamo Tengah	71,83	40,78	28,87
24	Yalimo	74,13	25,08	9,96
25	Puncak	37,74	[10,11]	[3,55]
26	Dogiyai	78,78	29,06	6,58
27	Intan Jaya	53,27	7,42	1,31
28	Deiyai	86,02	64,17	[41,51]
29	Kota Jayapura	82,15	67,75	54,13
	2012	70,79	43,38	30,05
	PAPUA 2011	70,13	46,03	32,45
	2010	76,22	49,62	36,06

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 12
APS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2012

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
7-12	Laki-Laki	76,40	73,75	74,96
	Perempuan	76,00	72,93	75,78
	Total	76,22	73,36	75,34
13-15	Laki-Laki	75,61	71,25	68,24
	Perempuan	72,91	71,35	69,88
	Total	74,35	71,29	68,99
16-18	Laki-Laki	52,34	51,29	52,58
	Perempuan	43,55	49,56	48,23
	Total	48,28	50,55	50,66

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 13
APK Dirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2012

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
SD	Laki-Laki	92,41	85,28	83,33
	Perempuan	94,30	83,79	85,13
	Total	93,27	84,59	84,16
SMP	Laki-Laki	65,01	68,91	73,19
	Perempuan	54,39	68,42	68,42
	Total	60,05	68,69	70,99
SMA	Laki-Laki	49,38	48,98	46,28
	Perempuan	46,82	45,95	42,20
	Total	48,20	47,69	44,48

Sumber : Susenas Kor 2012

Tabel 14
APM Dirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2012

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
SD	Laki-Laki	76,40	70,56	69,97
	Perempuan	76,00	69,63	71,74
	Total	76,22	70,13	70,79
SMP	Laki-Laki	52,04	45,34	43,78
	Perempuan	46,88	46,85	42,91
	Total	49,62	46,03	43,38
SMA	Laki-Laki	38,08	32,54	32,25
	Perempuan	33,69	32,34	27,29
	Total	36,06	32,45	30,05

Sumber : Susenas Kor 2012